



PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN

RENCANA KERJA (RENJA) BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN 2025



PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN SERUYAN

Jl. Moh. Hatta Nomor Telp./Facs. (0538) 2022310Kuala Pembuang 74212 Kalimantan Tengah

Email : kesbangpollinmasseruyan@gmail.com

Website : www.kesbangpol.seruyankab.go.id

Kuala Pembuang, September 2024



**BUPATI SERUYAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 100.3.3.2/ 474 /2024**

TENTANG

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2025**

BUPATI SERUYAN,

- Menimbang** : a. bahwa sebagai sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah dengan Peraturan Bupati Seruyan Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
- b. bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah digunakan sebagai pedoman Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Seruyan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6091);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2009 Nomor 33);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 63, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 76);
15. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2023 Nomor 10);
16. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024 Nomor 13).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;
- KEDUA** : Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada **diktum KESATU** menjadi dasar dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Kabupaten Seruyan Tahun 2025;
- KETIGA** : Sistematisasi penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada **diktum KESATU** yaitu sebagai berikut:
- BAB I : PENDAHULUAN
 - BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
 - BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
 - BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH;
 - BAB V : PENUTUP

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 16 Agustus 2024

Pj. BUPATI SERUYAN,

DJAINUDDIN NOOR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 100.3.3.2/ 474/2024
TANGGAL 16 Agustus 2024
TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN
SERUYAN TAHUN 2025

NO	PERANGKAT DAERAH
1	2
1	Dinas Pendidikan Kabupaten Seruyan
2	Dinas Kesehatan Kabupaten Seruyan
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Seruyan
4	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Seruyan
5	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan
6	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Seruyan
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seruyan
8	Dinas Sosial Kabupaten Seruyan
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Seruyan

NO	PERANGKAT DAERAH
1	2
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Seruyan
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Seruyan
12	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Seruyan
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seruyan
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Seruyan
15	Dinas Perhubungan Kabupaten Seruyan
16	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Seruyan
17	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Seruyan
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seruyan
19	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Seruyan
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Seruyan
21	Dinas Perikanan Kabupaten Seruyan

NO	PERANGKAT DAERAH
1	2
22	Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan
23	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan
24	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Seruyan
25	Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seruyan
26	Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seruyan
27	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Seruyan
28	Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan
29	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan
30	Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan
31	Kecamatan Seruyan Hilir Timur Kabupaten Seruyan
32	Kecamatan Danau Sembuluh Kabupaten Seruyan
33	Kecamatan Seruyan Raya Kabupaten Seruyan

NO	PERANGKAT DAERAH
1	2
34	Kecamatan Danau Seluluk Kabupaten Seruyan
35	Kecamatan Hanau Kabupaten Seruyan
36	Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Seruyan
37	Kecamatan Seruyan Tengah Kabupaten Seruyan
38	Kecamatan Seruyan Hulu Kabupaten Seruyan
39	Kecamatan Suling Tambun Kabupaten Seruyan

PJ. BUPATI SERUYAN,

DJAINUDDIN NOOR



KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji dan syukur kehadiran Allah SWT, bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan telah menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025 sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Atas dasar ini RENJA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025 disusun dengan memuat tujuan, sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan berikut dengan pendanaan bersifat indikatif sesuai dengan tugas dan fungsinya yang berpedoman pada RENSTRA Tahun 2024-2026 dan RPD Kabupaten Seruyan 2024-2026.

Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi hingga tersusunnya RENJA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025 ini. Perlu disadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penyusunannya, oleh karena itu masukan serta saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan guna kesempurnaan penyusunannya di masa mendatang. Terima kasih.

Kuala Pembuang, Agustus 2024
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Seruyan,

HARTA SIMA, M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 19650228 198812 1 001





DAFTAR ISI

<i>Uraian</i>	<i>Halaman</i>
HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	8
1.4. Sistematika Penulisan	9
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	10
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD	10
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	22
2.3. Isu-isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	24
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	26
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	35
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	40
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	40
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	42
3.3. Program dan Kegiatan Prioritas Perangkat Daerah	45
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	52
BAB V PENUTUP	58



DAFTAR TABEL

Urutan

- Tabel 2.1. Hasil Evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Badan KESBANGPOL Kabupaten Seruyan Tahun 2024 dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Badan KESBANGPOL Kabupaten Seruyan 2024-2026
- Tabel 2.2. Hasil Evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Badan KESBANGPOL Kabupaten Seruyan Tahun 2023 dan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Badan KESBANGPOL Kabupaten Seruyan 2021-2023
- Tabel 2.3. Tujuan, Sasaran dan Indikator RENSTRA Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026
- Tabel 2.4. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan
- Tabel 2.5. Review Terhadap RKPD Tahun 2025 Kabupaten Seruyan
- Tabel 2.6. Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2025
- Tabel 3.1. Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Target Kinerja Tahun 2025
- Tabel 3.2. Program dan Kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025
- Tabel 4.1. Rencana Kerja Dan Pendanaan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Seruyan Tahun 2025
- Tabel 4.2. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2026 Pada Aplikasi SIPD-RI



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dalam penyusunannya terdiri atas 6 (enam) tahapan yaitu tahap persiapan penyusunan, penyusunan Rancangan, penyusunan forum PD/lintas PD, perumusan rancangan akhir, dan penetapan. Perangkat Daerah (PD) menyusun Rancangan Renja PD dengan berpedoman pada Renstra PD, hasil evaluasi hasil Renja PD tahun lalu, dan hasil evaluasi Renja PD tahun berjalan.

Renja PD merupakan acuan bagi setiap Perangkat Daerah (PD) dalam mengoperasionalkan program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi jangka menengah daerah. Dengan rencana kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan, maka menjadi satu instrumen dan indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah.

Penyusunan Renja bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD. Renja Badan KESBANGPOL Kabupaten Seruyan merupakan bagian yang utuh dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026 dan Rencana Strategis (Renstra) Badan KESBANGPOL Kabupaten Seruyan 2024-2026, karena Renja menterjemahkan perencanaan strategis jangka menengah tersebut ke dalam rencana





menengah tersebut ke dalam rencana program/kegiatan/subkegiatan dan penganggaran tahunan. Kedua dokumen perencanaan strategis jangka menengah tersebut adalah merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Penyusunan dokumen perencanaan strategis teknis dimaksud mengacu atau berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Penyusunan RENJA Badan KESBANGPOL Kabupaten Seruyan Tahun 2025 ini berpedoman pada RPD Kabupaten Seruyan 2024-2026, Merujuk pada RPJPD Kabupaten Seruyan maka visi pembangunan jangka Panjang Kabupaten Seruyan Tahun 2005-2025 adalah “TERWUJUDNYA MASYARAKAT MADANI YANG ADIL DAN SEJAHTERA”. Dengan demikian, bahwa Rencana Kerja (RENJA) Badan KESBANGPOL Kabupaten Seruyan Tahun 2025 yang disusun ini diharapkan dapat mewujudkan pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan serta menjamin efektivitas dan efisiensi dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025.

R
E
N
J
A

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan Tahun 2025 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2
0
2
5





3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan





- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 13. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 86);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);





16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) sebagaimana telah dilakukan pemutakhiran dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 050-3708);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 - 440 Tahun 2019 tentang Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
22. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);
23. Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Kepmendagri Nomor 050-5889 tentang Hasil Verifikasi Validasi dan





- Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
 25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 102);
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2009 Nomor 33);
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018 Nomor 56, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 69);
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2019 Nomor 48, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 77) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 85);
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten





Seruyan Tahun 2021 Nomor 35, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 69);

30. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 61 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2022 Nomor 63);
31. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024 Nomor 13).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) Tahun 2025 adalah memberikan arah kebijakan bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan dalam melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri selama 1 (satu) tahun ke depan dengan berpedoman pada Rencana Strstegis (RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan 2024–2026.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan Tahun 2025 adalah:

1. Terwujudnya keterpaduan dan sinergi program, kegiatan dan subkegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri yang mengarah pada pencapaian tujuan pembangunan baik ditingkat daerah maupun nasional;
2. Tersedianya pedoman dalam penyusunan dan evaluasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan tahunan yang mengarah pada pencapaian Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan politik;
3. Tersedianya acuan bagi pelaksanaan kegiatan tahunan yang akan dijalankan oleh seluruh pegawai baik pejabat struktural maupun pelaksana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan;





4. Sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2025 untuk penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025;
5. Tersedianya acuan bagi pemangku peran (*stakeholder*) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan dalam memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam hal pengawasan publik;

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (RENJA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan Tahun 2025 disajikan dalam 5 (*lima*) Bab dan masing-masing Bab memuat beberapa Sub Bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023), dan perkiraan capaian tahun berjalan (2023) serta Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2023
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN

- 3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB V. PENUTUP





BAB II HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD

Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan. Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Kinerja sendiri merupakan keluaran/hasil dari sub kegiatan/kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

Pengukuran Laporan Kinerja dilakukan dengan menggunakan konsep *Value for Money*. Penggunaan konsep dimaksud memerlukan indikator-indikator sebagai berikut :

- Indikator Masukan (*Input*), untuk mengukur jumlah sumberdaya seperti anggaran (dana), SDM, peralatan, material, dan masukan lainnya untuk melakukan satu kegiatan. Dengan meninjau distribusi sumberdaya dapat dianalisis apakah alokasi sumberdaya yang dimiliki telah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan.
- Indikator Keluaran (*Output*), merupakan indikator yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan, baik berupa fisik maupun berupa non fisik.
- Indikator Hasil (*Outcome*), merupakan indikator yang menunjukkan telah dicapainya maksud dan tujuan dari kegiatan-kegiatan yang telah selesai dilaksanakan atau indikator yang pencerminan berfungsinya keluaran pada jangka menengah.

Sedangkan Laporan Keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban keuangan yang berbentuk laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Dalam hal tahun 2023 merupakan tahun terakhir dari perubahan Renstra 2021-2023, maka tahun 2024 merupakan tahun pertama dari Renstra Tahun 2024-2026. Maka dari itu capaian kinerja tahun 2023 tidak dapat digabungkan dengan capaian kinerja Renja tahun 2024. Pada Tahun 2023 rata-rata capaian kinerja Renja dibandingkan dengan Renstra adalah 111.43%. Sedangkan tahun 2024 capaian





kinerja Renja sampai dengan akhir triwulan II sebesar 31, 27%. Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Badan KESBANGPOL Kabupaten Seruyan Tahun 2024 dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Badan KESBANGPOL Kabupaten Seruyan 2024-2026 dan Tahun 2023 dan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Badan KESBANGPOL Kabupaten Seruyan 2021-2023 adalah sebagaimana Tabel 2.1. dan 2.2 berikut.





Tabel 2.1

Hasil Evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Badan KESBANGPOL Kabupaten Seruyan Tahun 2024 dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Badan KESBANGPOL Kabupaten Seruyan 2024-2026

No.	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024 s/d 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Kinerja pada triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab		
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14=7+13		15=(14/6)*100			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Meningkatnya Tata Kelola dan Kinerja Perangkat Daerah		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase unit kerja yang mendapatkan administrasi perkantoran	300	Persen	14,140,383,385			3,838,674,835		627,836,565	1,335,558,833		-	-		1,963,387,398		1,963,387,398						
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dilaksanakan	300	Persen	319,000,000			-		15,585,500	2,593,100		-			18,178,600		18,178,600	0.00	5.86				
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	24	Dokumen	220,000,000		Dokumen	8	Dokumen	15,585,500	0	Dokumen	2,593,100		8	Dokumen	18,178,600	8	Dokumen	18,178,600	33.33	6.26		
			Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	8	Laporan	60,000,000		Laporan	1	Laporan	0	1	Laporan	-		2	Laporan	-	2	Laporan	-	25.00	0.00		
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8	Laporan	30,000,000		Laporan	1	Laporan	0	1	Laporan	-		2	Laporan	-	2	Laporan	-	25.00	0.00		
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	300	Persen	9,000,000,000			3,000,000,000		351,715,182	977,824,676				1,329,539,858		1,329,539,858	-	14.77					
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	69	Orang	9,000,000,000		23	Orang	3,000,000,000	21	Orang	351,715,182	3	Orang	977,824,676		24	Orang	1,329,539,858	24	Orang	1,329,539,858	34.78	14.77
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Kegiatan Penyediaan jasa penunjang/urusan pemerintah daerah	300	Persen	2,114,000,000			580,000,000		151,208,983	104,569,411.00				255,778,394		255,778,394	0.00	12.30					

RENJA
2025





Rencana Kerja (RENJA)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Seruyan Tahun 2025

		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	24	Laporan	24,000,000			Laporan	3	Laporan	-	3	Laporan	2,992,000.00			6	Laporan	2,992,000	3	Laporan	2,992,000	12.50	12.47		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36	Laporan	225,000,000		12	Laporan	75,000,000	3	Laporan	-	3	Laporan	15,063,439			6	Laporan	15,063,439	3	Laporan	15,063,439	8.33	6.69	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36	Laporan	1,630,000,000		12	Laporan	430,000,000	3	Laporan	125,060,983	3	Laporan	86,513,972			6	Laporan	211,574,955	3	Laporan	211,574,955	8.33	12.98	
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Laporan	235,000,000		4	Laporan	75,000,000	1	Laporan	26,148,000	1	Laporan	-			2	Laporan	26,148,000	1	Laporan	26,148,000	8.33	11.13	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	300	Persen	1,136,174,385			170,174,835			76,826,968			132,959,530					283,786,430			283,786,430	0.88	18.83		
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	12	Paket	40,000,000			Paket	0	Paket	-	2	Paket	8,480,000			2	Paket	8,480,000	2	Paket	8,480,000	16.67	21.20		
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3	Paket	30,000,000			Paket	0	Paket	-	1	Paket	6,814,250			1	Paket	6,814,250	1	Paket	6,814,250	33.33	22.71		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	Paket	50,000,000			Paket	0	Paket	-	0	Paket	-			0	Paket	-	0	Paket	-	0.00	0.00		
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3	Paket	40,000,000			Paket	0	Paket	-	1	Paket	5,137,400			1	Paket	5,137,400	1	Paket	5,137,400	33.33	12.84		
		Penyediaan Bahan Baku dan Persiapan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Baku dan Persiapan Perundang-Undangan yang Disediakan	24	Paket	40,000,000			Paket	0	Paket	-	4	Paket	3,560,000			4	Paket	3,560,000	4	Paket	3,560,000	16.67	8.90		
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	9	Paket	390,000,000		3	Paket	70,000,000	0	Paket	-	2	Paket	31,762,900			2	Paket	31,762,900	2	Paket	31,762,900	22.22	8.14	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	270	Laporan	540,174,385		90	Laporan	100,174,835	25	Laporan	70,826,900	63	Laporan	77,204,980			88	Laporan	148,031,880	63	Laporan	148,031,880	23.33	27.40	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Persen	744,599,000.00						38,590,000								38,590,000			38,590,000	0.88	5.17		
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	Unit	454,509,900.00			Unit	0	Unit	-	Unit	-				0	Unit	-	0	Unit	-	#DIV/0!	0.00		
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10	Unit	290,000,000.00			Unit	3	Unit	38,500,000	Unit	-				3	Unit	38,500,000	0	Unit	38,500,000	0.00	13.28		

RENJA
2025





Rencana Kerja (RENJA)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Seruyan Tahun 2025

		Pemeliharaan Barang Milik daerah Pemertanahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik daerah Pemertanahan Daerah yang dilaksanakan	100 Persen	410,500,000				100,500,000					29,480,800				29,480,800		29,480,800	0.00	7.18	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	30 Unit	205,500,000		10	Unit	68,500,000	0 Unit		4	Unit	20,294,800		4	Unit	20,294,800	4	Unit	20,294,800	13.33	9.88
		Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	150 Unit	160,000,000		50	Unit	40,000,000	0 Unit		8	Unit	9,194,000		8	Unit	9,194,000	8	Unit	9,194,000	5.33	5.75
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor atau Rongkaman Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Rongkaman Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1 Unit	45,000,000			Unit	0 Unit			0	Unit			0	Unit		0	Unit		0.00	0.00
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang disediakan	100 Persen	431,200,000									88,115,316	0	0		88,115,316		88,115,316	0.00	20.43	
		Pengadaan Pakan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	57 Paket	151,200,000			Paket	0 Paket			53	Paket	54,272,000		53	Paket	54,272,000	53	Paket	54,272,000	92.98	35.99
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	130,000,000			Orang	0 Orang			0	Orang			0	Orang		0	Orang		0.00	0.00
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	6 Orang	150,000,000			Orang	0 Orang			5	Orang	33,843,316		5	Orang	33,843,316	5	Orang	33,843,316	83.33	22.56
Meningkatnya rasa keadilan dan wawasan kebangsaan masyarakat		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase masyarakat yang dibina di Bidang Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan selama 3 Tahun	0.50 Persen	3,550,000,000				1,000,000,000		8,442,200		14,644,600.00				23,086,600		23,086,600	0.00	0.65		
		Penyusunan Kebijakan Teknis dan pematapan pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase masyarakat yang dibina di Bidang Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan selama 3 Tahun	0.50 Persen	3,550,000,000				1,000,000,000		8,442,200		14,644,600.00				23,086,600.00		23,086,600.00	0.00	0.65		
		Pembentukan Pasukabraka	Jumlah Pasukabraka	213 Orang	3,000,000,000			Orang	1,000,000,000	0 Orang				14,644,400		0	Orang	14,644,400	0	Orang	14,644,400	0.00	0.49
		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembangunan Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembangunan Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	260 Orang	275,000,000			Orang		0 Orang				0		0	Orang		0	Orang		0.00	0.00
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembangunan Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembangunan Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	100 Orang	100,000,000			Orang		4 Orang	8,442,200		0			4	Orang	8,442,200	0	Orang	8,442,200	0.00	0.44
		Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembangunan Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembangunan Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	6 Laporan	175,000,000			Laporan		2 Laporan	0		0			2	Laporan		0	Laporan		0.00	0.00

RENJA
2025





Rencana Kerja (RENJA)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Seruyan Tahun 2025

Meningkatnya rasa keadilan dan wawasan kebangsaan masyarakat		PROGRAM PEMERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Perencanaan Ormas dan LSM yang ber-SKT	52.48	Persen	200,000,000				11,358,092		129,916,000				141,274,092		141,274,092	0.00	70.64		
		Perencanaan Kebijakan Teknis dan Pemantauan Pelaksanaan Bidang dan Pengawasan Organisasi	Perencanaan Ormas dan LSM yang ber-SKT	52.48	Persen	200,000,000				11,358,092		129,916,000				141,274,092		141,274,092	0.00	70.64		
		Penyusunan Bahan Perencanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Singkerta Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Kebijakan di bidang Pendidikan Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Singkerta Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	4	Dokumen	100,000,000	Dokumen	0	Dokumen	9,022,092	1	Dokumen			1	Dokumen	9,022,092	1	Dokumen	25.00	9.02	
		Pelaksanaan Kebijakan di bidang Pendidikan Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Singkerta Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di bidang Pendidikan Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Singkerta Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	307	Orang	100,000,000	Orang	0	Orang	2,336,000	Ormas &	129,916,000			0	Orang	132,252,800	0	Orang	0.00	132.25	
Meningkatnya rasa keadilan dan wawasan kebangsaan masyarakat		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Perencanaan Masyarakat yang mendapatkan pembinaan di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	0.53	Persen	375,000,000				7,156,000		0				7,156,000		7,156,000	0.00	1.91		
		Perencanaan Kebijakan Teknis Dan Pemantauan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	Perencanaan Masyarakat yang mendapatkan pembinaan di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	0.53	Persen	375,000,000				7,156,000		0				7,156,000		7,156,000	0.00	1.91		
		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	375	Orang	125,000,000	Orang	75	Orang	7,156,000	Ormas &				75	Orang	7,156,000	0	Orang	0.00	5.72	
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	170	Orang	100,000,000	Orang	0	Orang	0	0	Ormas &			0	Orang		0	Orang	0.00	0.00	

RENJA
2025





RENJA
2025



Berdasarkan Tabel 2.1. tersebut di atas, bahwa hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 dan Rencana Strategis (Renstra) Periode 2024-2026 pada Badan KESBANGPOL Kabupaten Seruyan, dapat dijelaskan dengan pokok-pokok materi yang dapat disajikan sebagai berikut :

1. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang *tidak memenuhi target kinerja* hasil/keluaran yang direncanakan.

- 1) Pada RENJA-PD Tahun 2024, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan merencanakan 6 Program (5 Program Teknis dan 1 Program Non-Teknis), 12 Kegiatan (5 Kegiatan Teknis dan 7 Kegiatan Non-Teknis) dan 39 Sub Kegiatan (17 Sub Kegiatan Teknis dan 22 Sub Kegiatan Non-Teknis).
- 2) Dari Program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan ada beberapa yang belum memenuhi target kinerja yang direncanakan, yaitu:
 - a. **Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan** apabila dilihat dari target kinerja program sebesar 46,53% dan realisasi kinerja sampai dengan Triwulan II sebesar 44.79% dan persentase capaian kinerja sebesar 96.26% dimana target kinerja program, kegiatan dan Sub Kegiatan masih belum mencapai target yang telah ditentukan.
 - b. **Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial** apabila dilihat dari target kinerja program sebesar 0% dan realisasi kinerja masih sebesar 0% dimana masih belum mencapai target yang telah ditentukan, sebagian sub kegiatan pada program yang memenuhi target kinerja, kecuali *Sub kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah dan Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah* masih belum ada yang terealisasi.





- c. **Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan** apabila dilihat dari target kinerja program sebesar 0,14% dan realisasi kinerja sebesar 0,00 dengan persentase sebesar 0,0%, dimana target kinerja program dan kegiatan masih belum mencapai target yang telah ditentukan, namun target kinerja sub kegiatan telah mencapai target yang telah ditentukan.
- d. **Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik** apabila dilihat dari target kinerja program sebesar 0.18% dan realisasi kinerja sebesar 0.13% dengan persentase sebesar 72.22%, dimana target kinerja program dan kegiatan masih belum mencapai target yang telah ditentukan, namun target kinerja sub kegiatan telah mencapai target yang telah ditentukan.
- e. **Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya**
- dilihat dari target kinerja program sebesar 0.17% dan realisasi kinerja sebesar 0.05 dengan persentase sebesar 29.41%, dimana target kinerja program dan kegiatan masih belum mencapai target yang telah ditentukan, namun target kinerja sub kegiatan telah mencapai target yang telah ditentukan.
2. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang *telah memenuhi target kinerja* hasil/keluaran yang direncanakan.
 3. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang *melebihi target kinerja* hasil/keluaran yang direncanakan.
 4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan.
 - Faktor-faktor penyebab *tidak tercapainya* atau *belum tercapai sepenuhnya target kinerja* program/kegiatan, antara lain :
 - Kurangnya akuratnya data yang dimiliki oleh bidang terkait, sehingga menyebabkan belum tercapainya target.
 - Luasnya wilayah kerja dan terbatasnya anggaran serta
 - Sumberdaya manusia yang menjalankan uraian tugas dan fungsi maupun kegiatan yang diberikan masih belum optimal.





- Faktor-faktor penyebab *terpenuhinya target kinerja* program/kegiatan/sub kegiatan, antara lain :
 - Ketersediaan anggaran yang cukup untuk pencapaian target kinerja serta pelaksanaannya sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
 - Faktor-faktor penyebab *melebihi target kinerja* program/kegiatan, antara lain :
 - Ketersediaan anggaran yang cukup untuk pencapaian target kinerja serta pelaksanaannya sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah.
- Pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan konsisten sesuai jadwal yang telah ditetapkan berdasarkan dengan RAK, maka akan berimplikasi terhadap capaian kinerja pertriwulan termasuk penyerapan anggaran, sehingga pada akhir periode anggaran diharapkan realisasi kinerja program/kegiatan minimal tercapai 100% yang juga akan berimplikasi terhadap capaian target program Renstra PD.
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.
- Penyediaan anggaran kegiatan yang cukup agar target kinerja dapat tercapai sepenuhnya sehingga konsistensi terhadap target Renstra PD dapat tercapai.
 - Monitoring dan mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan tahun berjalan (realisasi capaian kinerja dan penyerapan anggaran) sebagai bahan untuk penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran tahun selanjutnya.





Tabel 2.2

Hasil Evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Badan KESBANGPOL Kabupaten Seruyan Tahun 2023 dan
Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Badan KESBANGPOL Kabupaten Seruyan 2021-2023

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RENSTRA pada Tahun 2023 (akhir periode RENSTRA)			Realisasi Capaian Kinerja RENJA Tahun 2019 s/d 2022		Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan yang Dievaluasi (TW IV 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENJA s/d TW IV 2023		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung g Jawab	Ket.	
							K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = B7 x 100		10 = 6 + 8		11=10B x100%		12	13	
1.	8	01	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4	500%	persen	16,675,923,662															
1.	8	01	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang mendapatkan administrasi perkantoran	100%	persen	1,430,363,708															
1.	8	01	1	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dilaksanakan	41	Jenis	730,181,854	0	-	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0.00	0.00	Kesbangpol		
2.	8	01	1	2.01	06	Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	36	Bulan	607,948,254	25	436,467,304	8	86,030,000	8	60,658,600	100.00	70.51	33	497,125,904	91.67	81.77	Kesbangpol	
3.	8	01	1	2.01	07	Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	36	Bulan	92,233,600	12	15,496,800	4	1,500,000	4	1,500,000	100.00	100.00	16	16,996,600	44.44	18.43	Kesbangpol	
2.	8	01	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2400%	persen	30,000,000														
4.	8	01	1	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	60	Bulan	11,287,922,185	0	-	0	0	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0.00	0.00	Kesbangpol	

RENJA
2025

RENJA
2025



Rencana Kerja (RENJA)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Seruyan Tahun 2025

14.	8	01	1	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4,000	Unit	118,678,000	8820	95,734,000	8	14,800,000	8	10,400,000	100.00	0.00	8,828	106,134,000	221	89	Kesbangpol		
15.	8	01	1	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	454	Unit	707,870,500	2300	476,176,500	3	190,000,000	3	167,099,500	100.00	87.95	2303	643,276,000	507	91	Kesbangpol		
5.	8	01	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45400%	persen	1,253,273,269															
16.	8	01	1	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan	2	Unit	1,307,506,000	0	-	0	0	0	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0.00	0.00	Kesbangpol	
17.	8	01	1	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang diadakan	3	Unit	38,482,000	2	38,482,000	0	0	0	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	2	38,482,000	66.67	100.00	Kesbangpol	
18.	8	01	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	348	Bulan	222,000,000	1	222,000,000	0	0	0	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	1	222,000,000	0.29	100.00	Kesbangpol	
6.	8	01	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	20700%	persen	1,047,024,000															
19.	8	01	1	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan	35	Unit	933,168,500	0	-	0	0	0	0	-	#DIV/0!	0.00	0	0	0.00	0.00	Kesbangpol	
20.	8	01	1	2.09	06	Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	60	Bulan	393,330,000	23	268,174,400	10	93,784,000	7	79,448,300	70.00	0.00	30	347,622,700	50.00	88.38	Kesbangpol		
21.	8	01	1	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5	Unit	294,525,000	36	225,115,000	50	52,470,000	25	49,640,000	50	0.00	61	274,755,000	1220.00	93.29	Kesbangpol		

RENJA
2025





Rencana Kerja (RENJA)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Seruyan Tahun 2025

7.	8	01	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	500%	persen	245,313,500															
22.	8	01	1	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang disediakan	1	Stel	839,446,000	168	158,200,000	112	61,600,000	0	-	0.00	0.00	168	158,200,000	16800.00	18.85	Kesbangpol		
23.	8	01	1	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	393	Org	354,200,000	10	128,000,000	2	15,650,000	53	71,946,000	2650.00	0.00	63	197,946,000	16.03	55.89	Kesbangpol		
24.	8	01	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6	Org	146,056,000	0	-	7	64,050,000	1	7,460,000	14.29	0.00	1	7,460,000	16.67	5.11	Kesbangpol		
II.	8	01	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2900%	persen	2,639,004,000															
8.	8	01	05	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemanapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	Laju Pertumbuhan Pembinaan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekonomi	0.05	Poin	2,639,004,000															
25.	8	01	05	2.01	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Rasio masyarakat yang mendapat pembinaan peningkatan pengembangan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekonomi.	10	Keg.	1,508,414,500	4	192,000,000	2	158,743,500	0	-	0.00	0.00	4	192,000,000	40.00	12.73	Kesbangpol		
26.	8	01	05	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kegiatan Pembinaan Kerukunan Umat Beragama dan Aliran Kepercayaan	10	Keg.	350,743,500	4	207,080,000	2	207,348,000	0	-	0.00	0.00	4	207,080,000	40.00	59.04	Kesbangpol		

RENJA 2025

RENJA
2025

27.	8	01	05	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	10	Keg.	534,428,000	4	90,200,000	2	45,218,000	300	67,400,200	15000.00	149.06	304	157,600,200	3040.00	29.49	Kesbangpol
28.	8	01	05	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	60	Bulan	245,418,000	24	107,370,000	12	45,455,000	300	43,690,100	2500.00	96.12	324	151,060,100	540.00	61.55	Kesbangpol
III.	8	01	02			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	5.00	Poin	5,468,242,000													
9.	8	01	02	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Laju Pertumbuhan Masyarakat yang dibina dalam Pengembangan Wawasan Kebangsaan.	5	Poin	5,468,242,000													
29.	8	01	02	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Rasio masyarakat yang mendapat pembinaan wawasan kebangsaan per-10.000 penduduk	15	Keg	2,879,080,000	6	1,025,380,000	3	719,778,000	0	-	0.00	0.00	6	1,025,380,000	40.00	35.61	Kesbangpol



Rencana Kerja (RENJA)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Seruyan Tahun 2025

30.	8	01	02	2.01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	10	Keg	2,005,246,000	5	112,900,000	2	50,868,000	450	178,969,402	22500.00	353.22	455	291,869,402	4550.00	14.56	Kesbangpol
31.	8	01	02	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	10	Keg	278,568,000	4	135,060,000	2	50,288,000	1	10,477,600	50.00	20.84	5	145,537,600	50.00	52.24	Kesbangpol
32.	8	01	02	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	10	Keg	295,348,000	5	110,900,000	2	49,998,000	345	23,637,600	17250.00	47.28	350	134,537,600	3500.00	45.55	Kesbangpol
IV.	8	01	06			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1000%	persen	2,677,817,400													
10.	8	01	06	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase Konflik Sosial yang diselesaikan.	100%	persen	2,677,817,400													

RENJA
2025



REVENUE JAN 20 5



RENJA
2025

[illegible]



Rencana Kerja (RENJA)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Seruyan Tahun 2025

38.	8	01	03	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	5	Keg	190,298,950	8	1,072,930,000	4	636,067,000	5	88,690,367	125.00	13.94	13	1,161,620,367	260.00	610.42	Kesbangpol
39.	8	01	03	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	10	Keg	1,556,086,900	4	57,090,000	2	91,888,950	4	100,818,253	200.00	109.72	8	157,908,253	80.00	10.15	Kesbangpol
40.	8	01	03	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	20	Dok	100,000,000	2	35,840,000	2	100,758,900	100	41,978,600	5000.00	41.66	102	77,818,600	510.00	77.82	Kesbangpol

RENJA
2025



Berdasarkan Tabel 2.2. tersebut di atas, bahwa hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 dan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (P-Renstra PD) Periode 2021-2023 pada Badan KESBANGPOL Kabupaten Seruyan, dapat dijelaskan dengan pokok-pokok materi yang dapat disajikan sebagai berikut :

1. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.
 - Kegiatan Perumusan Kebijakan teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
 - a. Hasil evaluasi Triwulan IV TA. 2023, Realisasi fisik dari Indikator Jumlah Dokumen Pelaksanaan Hasil Kegiatan pada Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan untuk realisasi fisik yang terlaksana hanya 1 Dokumen dengan capaian 50% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 16.308.400,- dengan capaian 47,40%.
 - b. Hasil evaluasi Triwulan IV TA. 2023, Realisasi fisik dari Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan dengan Indikator Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan untuk realisasi fisik yang terlaksana 450 Orang dengan capaian 128.57% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 178.969.402,- dengan capaian 95.15%.
 - c. Hasil evaluasi Triwulan IV TA. 2023, Realisasi fisik dari Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan dengan Indikator Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan untuk realisasi fisik yang terlaksana 345 Orang dengan capaian 172.50% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 23.637.600,- dengan capaian 98.15%.





- d. Hasil evaluasi Triwulan IV TA. 2023, Realisasi fisik dari Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan dengan Indikator Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan untuk realisasi fisik yang terlaksana 4 Laporan dengan capaian 133.33% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 34.053.200,- dengan capaian 96.33%.
2. Program Peningkatan Kewaspadaan nasioanal dan Peningkatan Kualitas dan fasilitas Penanganan Konflik Sosial.
 - Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial.
 - a. Hasil evaluasi Triwulan IV TA. 2023, Realisasi fisik dari Sub Kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah dengan Indikator Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun untuk realisasi fisik yang terlaksana 2 Dokumen dengan capaian 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 45.977.632,- dengan capaian 98.71%.
 - b. Hasil evaluasi Triwulan IV TA. 2023, Realisasi fisik dari Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah dengan Indikator Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta





Penanganan Konflik di Daerah, untuk realisasi fisik yang terlaksana 14 Orang dengan capaian 107.69% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 114.573.000,- dengan capaian 98.06%.

- c. Hasil evaluasi Triwulan IV TA. 2023, Realisasi fisik dari Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah dengan Indikator Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah, untuk realisasi fisik yang terlaksana 80 Orang dengan capaian 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 56.184.700,- dengan capaian 98.86%.

- d. Hasil evaluasi Triwulan IV TA. 2022, Realisasi fisik dari Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah dengan Indikator Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah, untuk realisasi fisik yang terlaksana 5 Laporan dengan capaian 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 88.169.900,- dengan capaian 99.76%.

3 Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Politik dan Pengembangan etika Serta Budaya politik.

- Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik.





- a. Hasil evaluasi Triwulan IV TA. 2023, Realisasi fisik dari Sub Kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah dengan Indikator Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun, untuk realisasi fisik yang terlaksana 5 Dokumen dengan capaian 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 88.690.367,- dengan capaian 93.45%.
- b. Hasil evaluasi Triwulan IV TA. 2023, Realisasi fisik dari Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah dengan Indikator Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah, untuk realisasi fisik yang terlaksana 300 Orang dengan capaian 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 18.397.602.180,- dengan capaian 99.99%.
- c. Hasil evaluasi Triwulan IV TA. 2023, Realisasi fisik dari Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah dengan Indikator Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah, untuk realisasi fisik yang terlaksana 100





Orang dengan capaian 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 41.978.600,- dengan capaian 85.55%.

- d. Hasil evaluasi Triwulan IV TA. 2023, Realisasi fisik dari Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah dengan Indikator Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah, untuk realisasi fisik yang terlaksana 4 Laporan dengan capaian 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 100.818.253,- dengan capaian 99.94%.

4. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya.

- Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.

- a. Hasil evaluasi Triwulan IV TA. 2023, Realisasi fisik dari Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah dengan Indikator Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah, untuk realisasi fisik yang terlaksana 300 Orang dengan capaian 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 67.400.200,- dengan capaian 64.06%.
- b. Hasil evaluasi Triwulan IV TA. 2023, Realisasi fisik dari Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah dengan Indikator Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat





Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah, untuk realisasi fisik yang terlaksana 300 Orang dengan capaian 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 43.690.100,- dengan capaian 39.53%.

- c. Hasil evaluasi Triwulan IV TA. 2023, Realisasi fisik dari Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah dengan Indikator Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah, untuk realisasi fisik yang terlaksana 5 Laporan dengan capaian 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 15.757.300,- dengan capaian 85.11%

5. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

- Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.

- a. Hasil evaluasi Triwulan IV TA. 2023, Realisasi fisik dari Sub Kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah dengan Indikator Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun, untuk realisasi fisik yang terlaksana 1 Dokumen dengan capaian 50% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 24.019.620,- dengan capaian 48.04%.

- b. Hasil evaluasi Triwulan IV TA. 2023, Realisasi fisik dari Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah dengan Indikator Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah, untuk realisasi fisik yang terlaksana 95 Orang dengan capaian 53.98% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 43.690.100,- dengan capaian 74.78%





6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
- a. Hasil evaluasi Triwulan IV TA. 2023, Realisasi fisik dari Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan Indikator Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, untuk realisasi fisik yang terlaksana 8 Dokumen dengan capaian 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 60.658.600,- dengan capaian 70.51%.
 - b. Hasil evaluasi Triwulan IV TA. 2023, Realisasi fisik dari Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan Indikator Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, untuk realisasi fisik yang terlaksana 4 Laporan dengan capaian 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.500.000,- dengan capaian 100%.
 - c. Hasil evaluasi Triwulan IV TA. 2023, Realisasi fisik dari Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan Indikator Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, untuk realisasi fisik yang terlaksana 4 Laporan dengan capaian 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 0 dengan capaian 0.
 - d. Hasil evaluasi Triwulan IV TA. 2023, Realisasi fisik dari Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan Indikator Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN, untuk realisasi fisik yang terlaksana 21 Orang dengan capaian 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.751.143.425,- dengan capaian 96.69%.
 - e. Hasil evaluasi Triwulan IV TA. 2023, Realisasi fisik dari Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan Indikator Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, untuk realisasi fisik yang terlaksana 12 Laporan dengan capaian 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 11.935.000,- dengan capaian 99.54%.





- f. Hasil evaluasi Triwulan IV TA. 2023, Realisasi fisik dari Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan Indikator Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan, untuk realisasi fisik yang terlaksana 12 Laporan dengan capaian 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 57.439.115,- dengan capaian 80.78%.
- g. Hasil evaluasi Triwulan IV TA. 2023, Realisasi fisik dari Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan Indikator Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan, untuk realisasi fisik yang terlaksana 12 Laporan dengan capaian 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 538.959.760,- dengan capaian 96.29%.
- h. Hasil evaluasi Triwulan IV TA. 2023, Realisasi fisik dari Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan Indikator Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan, untuk realisasi fisik yang terlaksana 4 Laporan dengan capaian 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 79.752.000,- dengan capaian 99.69%.
- i. Hasil evaluasi Triwulan IV TA. 2023, Realisasi fisik dari Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan Indikator Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan, untuk realisasi fisik yang terlaksana 4 Paket dengan capaian 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 17.568.000,- dengan capaian 97.49%.
- j. Hasil evaluasi Triwulan IV TA. 2023, Realisasi fisik dari Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan Indikator Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan, untuk realisasi fisik yang terlaksana 1 Paket dengan capaian 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 11.970.000,- dengan capaian 99.75%.
- k. Hasil evaluasi Triwulan IV TA. 2023, Realisasi fisik dari Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan Indikator Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan, untuk realisasi fisik yang terlaksana 1 Paket dengan capaian 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 18.292.000,- dengan capaian 99.09%.
- l. Hasil evaluasi Triwulan IV TA. 2023, Realisasi fisik dari Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan Indikator Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga





- yang Disediakan, untuk realisasi fisik yang terlaksana 1 Paket dengan capaian 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 11.208.000,- dengan capaian 93.40%.
- m. Hasil evaluasi Triwulan IV TA. 2023, Realisasi fisik dari Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan dengan Indikator Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan, untuk realisasi fisik yang terlaksana 8 Dokumen dengan capaian 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 10.400.000,- dengan capaian 70.27%.
- n. Hasil evaluasi Triwulan IV TA. 2023, Realisasi fisik dari Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan Indikator Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan, untuk realisasi fisik yang terlaksana 3 Paket dengan capaian 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 167.099.500,- dengan capaian 87.95%.
- o. Hasil evaluasi Triwulan IV TA. 2023, Realisasi fisik dari Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan Indikator Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, untuk realisasi fisik yang terlaksana 112 Laporan dengan capaian 124.44% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 275.001.233,- dengan capaian 88.48%.
- p. Hasil evaluasi Triwulan IV TA. 2023, Realisasi fisik dari Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan Indikator Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, untuk realisasi fisik yang terlaksana 112 Laporan dengan capaian 124.44% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 275.001.233,- dengan capaian 88.48%.
- q. Hasil evaluasi Triwulan IV TA. 2023, Realisasi fisik dari Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan Indikator Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan, untuk realisasi fisik yang terlaksana 20 Unit dengan capaian 200% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 150.035.000,- dengan capaian 100%.
- r. Hasil evaluasi Triwulan IV TA. 2023, Realisasi fisik dari Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan Indikator Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya, untuk realisasi fisik yang terlaksana 7 Unit dengan capaian 70% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 79.448.300,- dengan capaian 84.71%.





- s. Hasil evaluasi Triwulan IV TA. 2023, Realisasi fisik dari Sub Kegiatan Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan Indikator Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara, untuk realisasi fisik yang terlaksana 25 Unit dengan capaian 50% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 49.640.000,- dengan capaian 94.61%.
- t. Hasil evaluasi Triwulan IV TA. 2023, Realisasi fisik dari Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan Indikator Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi, untuk realisasi fisik yang terlaksana 1 Unit dengan capaian 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 19.300.000,- dengan capaian 100%.
- u. Hasil evaluasi Triwulan IV TA. 2023, Realisasi fisik dari Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya dengan Indikator Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan, untuk realisasi fisik yang terlaksana 53 Paket dengan capaian 92.98% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 71.946.000,- dengan capaian 98.09%.
- v. Hasil evaluasi Triwulan IV TA. 2023, Realisasi fisik dari Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dengan Indikator Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan, untuk realisasi fisik yang terlaksana 1 Orang dengan capaian 50% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 7.460.000,- dengan capaian 74.14%.
- w. Hasil evaluasi Triwulan IV TA. 2023, Realisasi fisik dari Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan dengan Indikator Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan, untuk realisasi fisik yang terlaksana 10 Orang dengan capaian 166.67% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 68.285.000,- dengan capaian 89.59%.

KENDALA DALAM PELAKSANAAN

Adanya pengurangan dan pergeseran anggaran kegiatan untuk mengakomodir adanya perubahan asumsi dari asumsi awal rencana kerja yang disesuaikan dengan ketersediaan anggaran, serta adanya perubahan Standar Biaya Umum (SBU) sehingga terjadi perubahan perhitungan dalam pelaksanaan kegiatan.





TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN

dilakukan penataan dan peningkatan kapasitas staf pelaksana untuk mendukung kinerja internal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan, terutama peningkatan pemahaman aparatur di lingkungan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan yang diinisiasikan secara berkelanjutan agar dapat menerapkan manajemen kinerja dan keuangan. (belum diperbaiki)

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah adalah merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan KESBANGPOL Kabupaten Seruyan 2024-2026 yang disusun selaras dengan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Seruyan 2024-2026.

Berpedoman pada RPD Kabupaten Seruyan 2024-2026, bahwa dalam rangka mendukung pencapaian arah kebijakan ” terdapat keselarasan antara Tujuan dan Sasaran serta Indikator Kinerja pada RPD Kabupaten Seruyan 2024-2026 dengan Renstra PD Badan KESBANGPOL Kabupaten Seruyan 2024-2026 sebagaimana dijelaskan dalam Tabel 2.3. berikut.

Tabel 2.3 Tujuan Dan Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan Tahun 2024 - 2026								
No.	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Kinerja			
					2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
1	2	3	4	5	6	8	9	10
1.	Meningkatkan stabilitas ipoleksosbud daerah	Persentase konflik 1. Ipoleksosbud yang diselesaikan	Meningkatnya rasa kesatuan 1. dan wawasan kebangsaan masyarakat		n/a	50	60	70
				Persentase Masyarakat yang mendapatkan pembinaan tentang wawasan kebangsaan	n/a	0.14	0.31	0.50
				Persentase Masyarakat yang dibina 1. di Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	n/a	0.14	0.31	0.50
				2. Persentase Konflik Sosial Yang Di Selesaikan	50	50	60	70
			2. Meningkatnya pemahaman politik masyarakat	Persentase Masyarakat yang mendapatkan pembinaan di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	n/a	0.17	0.34	0.53
				4. Persentase Ormas dan LSM yang ber-SKT	68.83	0.00	49.50	52.48
				Persentase Masyarakat yang paham terhadap politik	n/a	0.18	0.38	0.60
				1. Persentase Masyarakat yang mendapatkan Pembinaan Politik	n/a	0.18	0.38	0.60





Berdasarkan Tabel 2.3 tersebut diatas, maka Analisis kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Badan KESBANGPOL Kabupaten Seruyan 2024-2026 tertuang dalam capaian Sasaran Strategis Tahun 2025 adalah sebagaimana Tabel 2.4. berikut.

Tabel 2.4.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan

No	Indikator	SPM	IKK	Target Renstra PD					Realisasi Capaian				Proyeksi 2023	Catatan Analisis
				2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022		
1.	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)		✓	3,75	3,85	3,95	4,05	4,15	4,30	4,29	4,29	4,32	4,15	Sangat Baik
2.	Angka Kriminalitas		✓	8,65	8,35	8,05	7,75	7,45	4,12	4,65	5,33	5,34	7,45	Sangat Baik
3.	Angka Konflik yang ditangani.			0,42	0,41	0,4	0,39	0,38	0,27	0,27	0,41	0,40	0,38	Sangat Baik
4.	Laju Pertumbuhan Pembinaan dan Pengembangan Wawasan Kebangsaan.			4,50	4,60	4,75	4,90	5	4,38	0,30	17,73	5,10	5	Kurang Baik
5.	Persentase Konflik Sosial yang diselesaikan.			80	80	90	90	100	70	57,1	100	50	100	Kurang Baik
6.	Laju Pertumbuhan Pembinaan Politik.			4,50	4,60	4,75	4,90	5	4,29	4,71	5,58	16,12	5	Kurang Baik
7.	Laju Pertumbuhan Pembinaan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekonomi.			4,50	4,60	4,75	4,90	5	n/a	4,51	-71,15	250,56	5	Sangat Baik
8.	Persentase Ormas/LSM yang Ber-SKT			59,83	64,10	68,37	72,64	76,91	71,43	71,43	79,12	68,83	76,91	Sangat Baik

RENJA
2025

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

1. Analisis Tingkat Kinerja

Analisis kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan dari tahun 2019 s/d Tahun 2023 ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis, yaitu:

- 1) Belum optimalnya pembinaan, pengembangan dan peningkatan pemahaman masyarakat terhadap 4 (empat) pilar kebangsaan dalam rangka memantapkan ketahanan ideologi bangsa, kewaspadaan masyarakat dan pemerintah daerah, politik dan kemasyarakatan, dan ketahanan sosial budaya dan ekonomi





- 2) Belum terpenuhinya ketersediaan data dan informasi pembangunan (statistik sektoral) perangkat daerah yang akurat dan mutakhir pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan untuk perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan.
- 3) Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan dalam perencanaan pembangunan.
- 4) Belum optimalnya implementasi regulasi sistem perencanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan dalam perencanaan pembangunan.
- 5) Belum optimalnya konsistensi antar dokumen perencanaan dan antara dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan.
- 6) Belum optimalnya keterlibatan atau aspirasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan.
- 7) Terbatasnya sarana dan prasarana aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan dalam melaksanakan tugas dan fungsi.
- 8) Terbatasnya kualitas sumber daya aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan dalam melaksanakan tugas dan fungsi secara berkualitas dan tepat waktu.
- 9) Belum terpenuhinya formasi aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan sesuai dengan struktur perangkat daerah.
- 10) Belum Optimalnya penerapan Teknologi Informasi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan dalam proses perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan.

2. Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

Sebagaimana Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan yang selalu berkaitan dengan kondisi sosial politik, budaya, ekonomi dan juga situasi keamanan dan ketertiban setiap saat terus mengalami dinamika. Memperhatikan situasi dan kondisi yang berkembang di Kabupaten Seruyan dapat dikemukakan beberapa Isu-Isu strategis terkait dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan, sebagai berikut:





1. Mengoptimalkan pembinaan, pengembangan dan peningkatan pemahaman masyarakat terhadap 4 (empat) pilar kebangsaan dalam rangka memantapkan ketahanan ideologi bangsa, kewaspadaan dini, Pendidikan politik, organisasi kemasyarakatan, dan ketahanan sosial budaya dan ekonomi.
2. Peningkatan penyediaan data dan informasi pembangunan (statistik sektoral) perangkat daerah yang akurat dan mutakhir pada KESBANGPOL Kabupaten Seruyan guna keperluan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan.
3. Peningkatan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Strategis KESBANGPOL Kabupaten Seruyan.
4. Peningkatan pencapaian sasaran pembangunan baik dalam RPJMD dan RENSTRA KESBANGPOL Kabupaten Seruyan.
5. Peningkatan konsistensi antar dokumen perencanaan, serta dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran.
6. Peningkatan dukungan sarana dan prasarana aparatur KESBANGPOL dalam melaksanakan tugas dan fungsi.
7. Peningkatan kualitas sumber daya aparatur KESBANGPOL yang profesional.
8. Peningkatan penerapan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam pelaksanaan tugas dan fungsi KESBANGPOL Kabupaten Seruyan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja (Renja) merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan setiap tahunnya. Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 yang disusun ini memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran serta rencana capaiannya yang merupakan tolak





ukur keberhasilan dari tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan.

Disamping itu juga, dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Ranhir Renja-PD) Tahun 2025 yang disusun ini memuat informasi tentang program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja (Ranhir Renja) ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan. Program dan kegiatan Tahun 2025 yang telah diusulkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan merupakan Rencana Kerja (Renja) yang akan dilaksanakan Tahun 2025 dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati Seruyan.

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Ranhir-RKPD) yang menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) oleh karena itu perlu dilakukan review terhadap Rancangan Awal RKPD 2025 tersebut. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan akhir RKPD dengan hasil analisis kebutuhan terhadap Program dan Kegiatan beserta Rencana Kebutuhan Dana yang termuat dalam dokumen Rancangan Akhir Renja-PD yang disusun dari tahap Rancangan Awal, Rancangan dan Rancangan Akhir dan apabila ada koreksi atau terdapat perbedaan dalam hasil review pada setiap tahap penyusunannya dapat diperbaiki atau disempurnakan sebelum ditetapkannya RKPD Kabupaten Tahun 2025 melalui Peraturan Bupati Seruyan.

Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Seruyan Tahun 2025 sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.5. berikut.

RENJA
2025





Tabel 2.5
Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD Tahun 2025
Kabupaten Seruyan

NO	Rancangan Awal RKPD					Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan, Sub Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan, Sub Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM					
A.	BIDANG URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				7,066,144,000.00	BIDANG URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				10,266,144,000.00	
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase unit kerja yang mendapatkan administrasi perkantoran		100.00%	5,071,052,426	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase unit kerja yang mendapatkan administrasi perkantoran		100.00%	5,366,144,000	
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dilaksanakan		100%	154,970,400	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dilaksanakan		100%	155,000,000	
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten/ Kota Prov. KaltengKab. Seruyan	8 Dokumen	109,990,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten/ Kota Prov. KaltengKab. Seruyan	8 Dokumen	110,000,000	
2.	Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Seruyan	4 Laporan	29,995,000	Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Seruyan	4 Laporan	30,000,000	
3.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Seruyan	4 Laporan	14,985,400	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Seruyan	4 Laporan	15,000,000	

RENJA
2025



Rencana Kerja (RENJA)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Seruyan Tahun 2025

2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	3,044,693,466.00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	3,300,000,000.00	
4.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Seruyan	23 Orang	3,044,693,466.00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Seruyan	23 Orang	3,300,000,000.00	
3.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa penunjang urusan pemerintah daerah		100%	807,786,970	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa penunjang urusan pemerintah daerah		100%	767,000,000	
5.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Seruyan	12 Laporan	11,000,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Seruyan	12 Laporan	12,000,000	
6.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Seruyan	12 Laporan	76,201,690	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Seruyan	12 Laporan	75,000,000	
7.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Seruyan	12 Laporan	641,348,280	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Seruyan	12 Laporan	600,000,000.00	
8.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Seruyan	4 Laporan	79,237,000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Seruyan	4 Laporan	80,000,000	
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	410,045,750	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	480,000,000	
9.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Seruyan	4 Paket	15,200,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Seruyan	4 Paket	20,000,000	
10.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Seruyan	1 Paket	9,510,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Seruyan	1 Paket	15,000,000	
11.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Seruyan	1 Paket	16,150,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Seruyan	1 Paket	25,000,000	
12.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Seruyan	1 Paket	12,436,200	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Seruyan	1 Paket	20,000,000	
13.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Seruyan	8 Paket	13,300,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Seruyan	8 Paket	20,000,000	

RENJA
2025





Rencana Kerja (RENJA)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Seruyan Tahun 2025

RENJA
2025

14.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Seruyan	3 Paket	123,561,550	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Seruyan	3 Paket	160,000,000	
15.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		90 Laporan	219,888,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		90 Laporan	220,000,000	
5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	300,382,726	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	300,044,000	
16.	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Seruyan	1 Unit	154,954,926	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Seruyan	1 Unit	155,044,000	
17.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Seruyan	10 Unit	145,427,800	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Seruyan	10 Unit	145,000,000	
6.	Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan		100%	143,062,114	Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan		100%	148,500,000	
18.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Seruyan	10 Unit	68,380,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Seruyan	10 Unit	68,500,000	
19.	Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Seruyan	50 Unit	55,102,500	Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Seruyan	50 Unit	60,000,000	
20.	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kab. Seruyan	1 Unit	19,579,614	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kab. Seruyan	1 Unit	20,000,000	
7.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang disediakan		100%	210,111,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang disediakan		100%	215,600,000	
21.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Seruyan	57 Paket	70,110,000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Seruyan	57 Paket	75,600,000	
22.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		2 Orang	65,004,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		2 Orang	65,000,000	
23.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		6 Orang	74,997,000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		6 Orang	75,000,000	



Rencana Kerja (RENJA)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Seruyan Tahun 2025

II.	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Masyarakat yang dibina di Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Selama 3 Tahun		0.31	1,249,771,674.00	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Masyarakat yang dibina di Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Selama 3 Tahun		0.31	1,725,000,000.00
8	Perumusan Kebijakan Teknis dan pementapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Masyarakat yang dibina di Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Selama 3 Tahun		0.31	1,249,771,674.00	Perumusan Kebijakan Teknis dan pementapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Masyarakat yang dibina di Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Selama 3 Tahun		0.31	1,725,000,000.00
24.	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kabupaten/ Kota Prov. Kalteng Kab. Seruyan	120 Orang	180,205,500	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kabupaten/ Kota Prov. Kalteng Kab. Seruyan	120 Orang	250,000,000
25.	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	Kab. Seruyan	71 Orang	999,816,174	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	Kab. Seruyan	71 Orang	1,175,000,000
26.	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kabupaten/ Kota Prov. Kalteng Kab. Seruyan	50 Orang	38,170,000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kabupaten/ Kota Prov. Kalteng Kab. Seruyan	100 Orang	150,000,000
27.	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab. Seruyan	3 Laporan	31,580,000	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab. Seruyan	3 Laporan	150,000,000

RENJA
2025





III.	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Masyarakat yang mendapatkan Pembinaan Politik Selama 3 Tahun		0.38	245,343,900.00	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Masyarakat yang mendapatkan Pembinaan Politik Selama 3 Tahun		0.38	2,150,000,000.00
9.	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase Masyarakat yang mendapatkan Pembinaan Politik Selama 3 Tahun		0.38	245,343,900.00	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase Masyarakat yang mendapatkan Pembinaan Politik Selama 3 Tahun		0.38	2,150,000,000.00
28.	Penyusunan bahan Perumusan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	Kab. Seruyan	2 Dokumen	49,999,900	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	Kab. Seruyan	2 Dokumen	75,000,000
29.	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab. Seruyan	130 Orang	75,013,000	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab. Seruyan	250 Orang	1,775,000,000
30.	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kabupaten/ Kota Prov. Kalteng Kab. Seruyan	80 Orang	84,583,000	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kabupaten/ Kota Prov. Kalteng Kab. Seruyan	80 Orang	175,000,000



Rencana Kerja (RENJA)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Seruyan Tahun 2025

31.	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab. Seruyan	4 Laporan	35,748,000	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab. Seruyan	4 Laporan	125,000,000	
IV.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Ormas dan LSM yang ber-SKT.		49.50	99,935,000.00	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Ormas dan LSM yang ber-SKT.		49.50	125,000,000.00	
10.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Ormas dan LSM yang ber-SKT.		49.50	99,935,000.00	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Ormas dan LSM yang ber-SKT.		49.50	125,000,000.00	
32.	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	Kabupaten/ Kota Prov. Kalteng Kab. Seruyan	2 Dokumen	47,486,000	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	Kabupaten/ Kota Prov. Kalteng Kab. Seruyan	2 Dokumen	50,000,000	
33.	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kabupaten/ Kota Prov. Kalteng Kab. Seruyan	155 Orang	52,449,000	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kabupaten/ Kota Prov. Kalteng Kab. Seruyan	155 Orang	75,000,000	

RENJA
2025





V.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Masyarakat yang mendapatkan pembinaan di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		0.34	175,070,000.00	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Masyarakat yang mendapatkan pembinaan di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		0.17	425,000,000.00	
11.	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	Persentase Masyarakat yang mendapatkan pembinaan di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		0.34	175,070,000.00	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	Persentase Masyarakat yang mendapatkan pembinaan di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		0.17	425,000,000.00	
34.	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kabupaten/ Kota Prov. Kalteng Kab. Seruyan	185 Orang	55,975,000	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kabupaten/ Kota Prov. Kalteng Kab. Seruyan	171 Orang	150,000,000	
35.	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		80 Orang	58,060,000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		80 Orang	100,000,000	
36.	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kabupaten/ Kota Prov. Kalteng Kab. Seruyan	4 Laporan	61,035,000	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kabupaten/ Kota Prov. Kalteng Kab. Seruyan	4 Laporan	175,000,000	



Rencana Kerja (RENJA)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Seruyan Tahun 2025

VI.	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Konflik Sosial yang diselesaikan.		60.00	224,971,000.00	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Konflik Sosial yang diselesaikan.		50.00	475,000,000.00
12.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase Konflik Sosial yang ditangani		60.00	224,971,000.00	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase Konflik Sosial yang ditangani		50.00	475,000,000.00
37.	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	Kabupaten/ Kota Prov. Kalteng Kab. Seruyan	2 Dokumen	18,632,000	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	Kabupaten/ Kota Prov. Kalteng Kab. Seruyan	2 Dokumen	100,000,000
38.	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kabupaten/ Kota Prov. Kalteng Kab. Seruyan	11 Orang	74,751,000	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kabupaten/ Kota Prov. Kalteng Kab. Seruyan	11 Orang	100,000,000
39.	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kabupaten/ Kota Prov. Kalteng Kab. Seruyan	70 Orang	76,258,000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kabupaten/ Kota Prov. Kalteng Kab. Seruyan	70 Orang	100,000,000
40.	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab. Seruyan	4 Laporan	55,330,000	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab. Seruyan	4 Laporan	175,000,000
JUMLAH					7,066,144,000.00					10,266,144,000.00

RENJA
2025





2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat berdasarkan hasil penelitian lapangan dan pengamatan berdasarkan hasil pelaksanaan Musrenbang Kabupaten Seruyan khususnya Musrenbang Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan pada bulan Februari 2024, bahwa tidak terdapat usulan dari para pemangku kepentingan yang ditujukan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan sebagaimana Tabel 2.5. berikut.

Tabel 2.6.
Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2025

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Tidak Ada Usulan				

Adapun usulan para pemangku kepentingan adalah sebagai bahan/informasi dalam penyusunan program/kegiatan/subkegiatan dalam RENJA Tahun 2025 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan sebagaimana diuraikan berikut.

3) Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa

Melalui bidang ini usulan program, kegiatan dan subkegiatan masyarakat dengan arah kebijakan untuk :

- Revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila dan pendidikan wawasan kebangsaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Penyelenggaraan Pembinaan Kesadaran Bela Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Melaksanakan 5 (lima) program yang meliputi Gerakan Indonesia Melayani, Gerakan Indonesia Bersih, Gerakan Indonesia Tertib, Gerakan Indonesia Mandiri, dan Gerakan Indonesia Bersatu melalui kegiatan Penyelenggaraan Gerakan Revolusi Mental (GNRM) dan Pembentukan Gugus Tugas Gerakan Nasional





Revolusi Mental (GNRM) di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- Melaksanakan Penguatan Pendidikan Karakter di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Penyelenggaraan, pembinaan dan penguatan pembauran kebangsaan dan pelestarian Bhineka Tunggal Ika terkait tugas dan fungsi perangkat daerah yang menangani urusan bangsa dan politik;
- Pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), optimalisasi dan pemberdayaan FPK dalam bentuk program kegiatan atau dukungan belanja hibah dalam rangka fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan pembauran kebangsaan di daerah, meliputi penguatan kelembagaan, dukungan penganggaran, sarana dan prasarana, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan peran dan fungsi, serta pengawasan dan pelaporan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- Penyelenggaraan Revitalisasi Nilai-Nilai Sejarah Kebangsaan dalam Penguatan dan Kesatuan; dan
- Penyelenggaraan Peningkatan Kesadaran Warga Negara Indonesia tentang Hak dan Kewajiban.

Melalui program, kegiatan dan sub kegiatan yang diusulkan :

1. **Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan**, yang terdiri atas 1 kegiatan, yaitu :
 - Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, yang terdiri atas 4 subkegiatan, yaitu:
 - o Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan;
 - o Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan;
 - o Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan;





- #### 4) Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

- Penanganan konflik social sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Pembentukan dan penguatan tim terpadu penanganan konflik social tingkat kabupaten/kota;
- Pendanaan konflik faktual;
- Pemetaan daerah rawan konflik sosial hingga tingkat desa/kelurahan;
- Penanganan potensi ancaman, hambatan dan gangguan di daerah melalui deteksi dini dan cegah dini melalui pembentukan Tim Kewaspadaan Dini dan Pemberdayaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dengan temu cepat dan lapor cepat permasalahan/gangguan melalui pusat komunikasi sesuai dengan amanat Permendagri No. 2/2008 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 46/2019 tentang Perubahan atas Permendagri No. 2/2008 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah.
- Penguatan pengawasan orang asing, organisasi masyarakat asing, Lembaga asing dan tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Peningkatan efektivitas FORKOPIMDA Kabupaten, dan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan sebagai pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan dan dilaksanakan oleh bupati/wali kota, dan camat di wilayah kerja masing-masing;
- Peningkatan SDM aparatur kesbangpol di bidang intelijen dan kewaspadaan dini melalui Pendidikan dan pelatihan serta sosialisasi sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2/2008;
- Pembentukan dan penyelenggaraan pusat komunikasi dan informasi kewaspadaan dini tingkat provinsi, kabupaten/kota untuk menunjang pelaporan secara cepat.



tepat, dan akurat terkait situasi kondisi yang dapat menimbulkan ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan di daerah sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019, dan

Melalui program, kegiatan dan sub kegiatan yang diusulkan :

2. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial, yang terdiri atas 1 kegiatan, yaitu :

- Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial, yang terdiri atas 4 subkegiatan, yaitu:
 - o Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah;
 - o Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah;
 - o Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah;
 - o Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.

RENJA
2025

5) Bidang Politik Dalam Negeri

Melalui bidang ini usulan program dan kegiatan masyarakat dengan arah kebijakan untuk :

- Sosialisasi kebijakan dibidang politik dalam negeri;





- Pelaksanaan penyelenggaraan pemantauan, pelaporan dan evaluasi perkembangan politik di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Peningkatan kapasitas dan kelembagaan partai politik dalam rangka mewujudkan tata Kelola bantuan keuangan partai politik yang transparan dan akuntabel bagi partai politik penerima bantuan keuangan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

Melalui program, kegiatan dan sub kegiatan yang diusulkan :

1. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Politik dan Pengembangan etika Serta Budaya politik, yang terdiri atas 1 kegiatan, yaitu:

- Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik, yang terdiri atas 4 subkegiatan, yaitu:
 - o Sub Kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah;
 - o Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah;
 - o Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah;
 - o Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan





Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah.

6) Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial, Budaya Agama dan Organisasi Kemasyarakatan

Melalui bidang ini usulan program dan kegiatan masyarakat dengan arah kebijakan untuk :

- Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN dan PN) antara lain:
 - a) Pembentukan tim terpadu P4GN dan PN;
 - b) Penyusunan rencana aksi daerah P4GN dan PN;
 - c) Pembentukan perda tentang P4GN dan PN; dan
 - d) Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan P4GN dan PN.
- Koordinasi dan monitoring tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Tahun 2020-2024 antara lain:
 - a) Pelaksanaan rencana aksi generik;
 - b) Pelaksanaan rencana aksi khusus; dan
 - c) Pelaporan dan evaluasi Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024 pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020.
- Pelaksanaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/6397/SJ tanggal 25 November 2020 tentang Penyediaan Anggaran FKUB dalam APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib mengalokasi anggaran untuk FKUB dalam bentuk program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD terkait tugas dan fungsi dan/atau belanja hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Sosialisasi kebijakan dibidang organisasi kemasyarakatan;





- Penyiapan fasilitas pelayanan pendaftaran organisasi kemasyarakatan dan pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan (SIORMAS);
- Pembentukan dan Pemberdayaan Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;
- Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Organisasi Kemasyarakatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- Pengawasan Ormas yang meliputi pengawasan umum, pengawasan ormas berbasis resiko, pemetaan ormas dan pengukuran indeks kinerja ormas.

Melalui program, kegiatan dan sub kegiatan yang diusulkan :

3. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, yang terdiri atas 1 kegiatan, yaitu :

- Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, yang terdiri atas 3 subkegiatan, yaitu:
 - o Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah;
 - o Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah;
 - o Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.

4. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, yang terdiri atas 1 kegiatan, yaitu:

- Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, yang terdiri atas 2 sub kegiatan, yaitu:





- Sub Kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah;
- Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.

7) Bidang Sekretariat

Melalui bidang ini usulan program, kegiatan dan sub kegiatan masyarakat dengan arah kebijakan untuk :

- Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran;
- Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur berikut pemeliharaannya;
- Meningkatkan kualitas SDM aparatur dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya;
- Meningkatkan disiplin dan etos kerja aparatur;
- Peningkatan pelayanan prima kepada masyarakat.

Melalui program, kegiatan dan sub kegiatan yang diusulkan :

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**, yang terdiri atas 7 kegiatan, yaitu :
 - Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, yang terdiri atas 3 sub kegiatan, yaitu:
 - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, yang terdiri atas 3 subkegiatan, yaitu:
 - Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;





- Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, yang terdiri atas 3 subkegiatan, yaitu:
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, yang terdiri atas 1 subkegiatan, yaitu:
 - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
- Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, yang terdiri atas 3 subkegiatan, yaitu:
 - Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;
 - Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;
 - Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan.
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, yang terdiri atas 7 subkegiatan, yaitu:
 - Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, yang terdiri atas 4 subkegiatan, yaitu:
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat;





- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor;
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.





BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, sebagaimana termuat dalam Lampiran III tentang Matrik Pembangunan RPJM Nasional Tahun 2020-2024, bahwa pada Matrik Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/Lembaga memuat Program Kementerian Dalam Negeri (*Halaman OIO.A.1*) dan yang terkait dengan Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri ditetapkan 1 (satu) Program, yaitu : “Program Pembinaan Politik dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum” Program tersebut merupakan program teknis dengan tujuan memperkuat kesatuan dan persatuan nasional serta stabilitas politik dalam negeri yang dilandasi oleh semangat dan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 melalui pembangunan yang demokratis dan berkedulatan rakyat. Pelaksanaannya didukung melalui 5 (lima) kegiatan prioritas sebagaimana termuat dalam Matrik tersebut (*Halaman OIO.B.66 dan OIO.B.67*), yaitu :

1. Pembinaan dan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan (1 indikator);
2. Fasilitasi Politik Dalam Negeri (4 indikator);
3. Fasilitasi Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya (1 indikator);
4. Fasilitasi Kewaspadaan Nasional (2 indikator);
5. Bina Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan (2 Indikator).

Tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Permendagri Nomor 43 Tahun 2015 Pasal 144 dan 145). mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik dan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan di bidang politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, serta fasilitasi organisasi masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;





2. Pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, penerapan penghayatan dan pengamalan ideologi Pancasila, pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional, pembinaan kewaspadaan nasional, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi organisasi masyarakat dan fasilitasi penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. pelaksanaan pembinaan di bidang penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, fasilitasi organisasi masyarakat, penerapan penghayatan dan pengamalan ideologi Pancasila, pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional, pembinaan kewaspadaan nasional, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, serta fasilitasi penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, fasilitasi organisasi masyarakat, penerapan penghayatan dan pengamalan ideologi Pancasila, pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional, pembinaan kewaspadaan nasional, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, serta fasilitasi penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, fasilitasi organisasi masyarakat, penerapan penghayatan dan pengamalan ideologi Pancasila, pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional, pembinaan kewaspadaan nasional, pembinaan kerukunan antar dan intra suku, umat beragama,
7. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum; dan





8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Disamping itu terdapat juga Program Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang perlu ditindaklanjuti dalam upaya menjaga Stabilitas Politik dan Ketahanan Bangsa yaitu :
- a. Peningkatan kapasitas dan Akuntabilitas Kelembagaan Demokrasi melalui percepatan penyelesaian Undang-Undang Politik, Fasilitasi Penguatan Organisasi Masyarakat dan Partai Politik, dan Peningkatan Kerukunan Umat Beragama; dan
 - b. Penguatan Integritas Nasional yang didukung dengan pendidikan kebangsaan dan Cinta Tanah Air melalui Wawasan Kebangsaan, Pembauran Kebangsaan, Bela Negara dan Pengembangan Budaya dan Etika Politik.

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran dalam Renja Perangkat Daerah adalah turunan penjabaran tujuan Renstra Perangkat Daerah yang ingin dicapai dalam waktu 1 (satu) tahun didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan. Perumusan tujuan menjabarkan apa yang harus dicapai dan dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan, dan akan membantu mempermudah penilaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan.

Berdasarkan hasil analisis dengan mempertimbangkan permasalahan, isu strategis dan tinjauan faktor eksternal, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan menetapkan 1 (satu) **Tujuan pembangunan jangka menengah tahun 2024-2026**, yaitu :

“Meningkatkan stabilitas ipoleksosbud daerah “

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusanyang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. **Sasaran pembangunan jangka menengah tahun 2024-2026**, sebagai berikut :

1. **Meningkatnya rasa kesatuan dan wawasan kebangsaan masyarakat**
2. **Meningkatnya pemahaman politik masyarakat**





Untuk mengevaluasi pencapaian sasaran tersebut, maka dirumuskan indikator sasaran dan formulasi/rumus perhitungan indikator sasaran. Indikator sasaran yang digunakan untuk menilai sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan sampai dengan tahun 2024-2026 merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) masing-masing bagian/bidang selaku penanggungjawab pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah. Berikut Tabel 3.1 mengenai Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Target Kinerja dalam rangka pencapaian Tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan Tahun 2025.





Tabel 3.1

Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Target Kinerja Tahun 2025

Perangkat Daerah : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi/Rumus Indikator	Satuan	Target
1.	Meningkatkan stabilitas ipoleksosbud daerah	1. Meningkatnya rasa kesatuan dan wawasan kebangsaan masyarakat	1. Persentase Masyarakat yang dibina di Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Selama 3 Tahun	Jumlah Masyarakat yg diberikan pembinaan di Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Selama 3 Tahun / Jumlah Penduduk Usia Sekolah keatas x 100%	Persen	0.31
			2. Persentase Konflik Sosial yang diselesaikan.	Jumlah Konflik Sosial yang diselesaikan tahun n dibagi Jumlah Konflik Sosial yang ditangani tahun n dikalikan 100%.	Persen	60
			3. Persentase Ormas dan LSM yang ber-SKT	Jumlah Ormas yg Terdaftar (ber-SKT) / Jumlah Ormas yg Terdata x 100%	Persen	49.50
			4. Persentase Masyarakat yang mendapatkan pembinaan di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Selama 3 Tahun	Jumlah masyarakat yang mendapatkan pembinaan di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Selama 3 Tahun / Jumlah Penduduk x 100%	Persen	0.34
		2. Meningkatnya pemahaman politik masyarakat	5. Persentase Masyarakat yang mendapatkan Pembinaan Politik Selama 3 Tahun	Jumlah Masyarakat yg mendapatkan Pembinaan Politik Selama 3 Tahun /Jumlah Masyarakat yg berusia minimal 17 Tahun (Hak Pilih) x 100%	Persen	0.38
			6. Persentase unit kerja yang mendapatkan administrasi perkantoran	Jumlah Persentase unit kerja yang mendapatkan administrasi perkantoran/ Kota yang dilaksanakan/Jumlah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Yang disediakan x 100%	Persen	100

RENJA
2025





3.3. Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan disertai kebutuhan pendanaan yang dimuat dalam Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025 ini, merupakan turunan dari Rencana Strategis (RENSTRA) Badan KESBANGPOL Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026 yang telah terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026. Perencanaan program dalam dokumen Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025 diterapkan prinsip perencanaan *money follow program*. Program pembangunan ini sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Seruyan Tahun 2025 dan Rencana Kerja (Renja) Badan KESBANGPOL Kabupaten Seruyan Tahun 2025, serta menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Seruyan Tahun 2025.

Setiap program selanjutnya diterjemahkan ke dalam kegiatan prioritas. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi pencapaian organisasi. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi tujuan dan sasaran organisasi.

Dengan tersusunnya rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif dalam periode perencanaan pembangunan selama satu tahun, maka selanjutnya dapat dijadikan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja (RENJA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) beserta Perubahannya pada setiap tahun rencana selama periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan 2024-2026 yang dalam pelaksanaannya diharapkan konsisten.

Dalam Rencana Kerja (RENJA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan Tahun 2025 ini memuat **6 (enam) Program** (5 Program Teknis dan 1 Program Non-Teknis) dan **12 (dua belas) Kegiatan** (5 Kegiatan Teknis dan 7 Kegiatan Non-Teknis) yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi





Badan KESBANGPOL Kabupaten Seruyan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dan serta pencapaian *visi* dan *misinya* Kepala Daerah, didalamnya juga memuat amanat Presiden melalui Perpres tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka dalam rangka mengarusutamakan Pancasila dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Berbhinneka Tunggal Ika, perlu dilakukan pembinaan ideologi Pancasila secara terencana, menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan kepada Paskibraka yang merupakan putra dan putri terbaik bangsa yang dibentuk dengan semangat jiwa mempertahankan Pancasila yang dilambangkan dalam kendit bertuliskan Pandu Ibu Indonesia Berpancasila. Perumusan sub kegiatan pada setiap kegiatan dan program telah disinkronisasikan dengan peraturan perundangan yang mengatur tentang perencanaan pembangunan daerah dan penganggaran. Untuk menilai pencapaian kegiatan, maka pada setiap sub kegiatan dirumuskan indikator kinerja sub kegiatan.

Perumusan program dan kegiatan juga telah diarahkan untuk mendukung pencapaian kinerja pada setiap program guna terwujudnya pencapaian tujuan dan sasaran RENSTRA Badan KESBANGPOL Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026 serta pencapaian *visi* dan *misinya* RPJMD Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026. Lokasi kegiatan pada tahun rencana 2024 sebagian besar mendukung pengentasan desa/kelurahan desa tertinggal atau sangat tertinggal sebagaimana yang diarahkan oleh Pemerintah Daerah.

Seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan yang tertuang dalam Rencana Kerja (RENJA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan Tahun 2025 ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2025.

Untuk lebih jelasnya mengenai Tujuan, Sasaran dan indikator Renstra yang terkait dengan rumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, lokasi kegiatan dan kebutuhan pendanaan (*pagu indikatif*) tahun 2025 dan prakiraan maju tahun 2026 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan adalah sebagaimana disajikan dalam Tabel 3.2 berikut.





Tabel 2.5
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Kabupaten Seruyan

NO	Rancangan Awal RKPD					Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan, Sub Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan, Sub Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM					
A.	BIDANG URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				7,066,144,000.00	BIDANG URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				10,266,144,000.00	
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase unit kerja yang mendapatkan administrasi perkantoran		100.00%	5,071,052,426	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase unit kerja yang mendapatkan administrasi perkantoran		100.00%	5,366,144,000	
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dilaksanakan		100%	154,970,400	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dilaksanakan		100%	155,000,000	
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten/ Kota Prov. KaltengKab. Seruyan	8 Dokumen	109,990,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten/ Kota Prov. KaltengKab. Seruyan	8 Dokumen	110,000,000	
2.	Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Seruyan	4 Laporan	29,995,000	Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Seruyan	4 Laporan	30,000,000	
3.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Seruyan	4 Laporan	14,985,400	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Seruyan	4 Laporan	15,000,000	

RENJA
2025



8	01	1	2	08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa penunjang urusan pemerintah daerah		100%	807,786,970	100%	767,000,000
8	01	1	2	08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Seruyan	12 Laporan	11,000,000	12 Laporan	12,000,000
8	01	1	2	08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Seruyan	12 Laporan	76,201,690	12 Laporan	75,000,000
8	01	1	2	08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Seruyan	12 Laporan	641,348,280	12 Laporan	600,000,000.00
8	01	1	2	08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Seruyan	4 Laporan	79,237,000	4 Laporan	80,000,000
8	01	1	2	06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	410,045,750	100%	480,000,000
8	01	1	2	06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Seruyan	4 Paket	15,200,000	4 Paket	20,000,000
8	01	1	2	06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Seruyan	1 Paket	9,510,000	1 Paket	15,000,000
8	01	1	2	06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Seruyan	1 Paket	16,150,000	1 Paket	25,000,000
8	01	1	2	06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Seruyan	1 Paket	12,436,200	1 Paket	20,000,000
8	01	1	2	06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Seruyan	8 Paket	13,300,000	8 Paket	20,000,000
8	01	1	2	06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Seruyan	3 Paket	123,561,550	3 Paket	160,000,000
8	01	1	2	06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		90 Laporan	219,888,000	90 Laporan	220,000,000





8	01	1	2	07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	300,382,726	100%	444,465,000
	01	1	2	07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Seruyan	1 Unit	154,954,926	1 Unit	145,000,000
8	01	1	2	07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Seruyan	10 Unit	145,427,800	10 Unit	145,000,000
8	01	1	2	09	Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan		100%	143,062,114	100%	153,500,000
8	01	1	2	09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Seruyan	10 Unit	68,380,000	10 Unit	68,500,000
8	01	1	2	09.06	Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Seruyan	50 Unit	55,102,500	50 Unit	60,000,000
	01	1	2	09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kab. Seruyan	1 Unit	19,579,614	1 Unit	25,000,000
8	01	1	2	05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang disediakan		100%	210,111,000	100%	215,600,000
8	01	1	2	05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Seruyan	57 Paket	70,110,000	57 Paket	75,600,000
8	01	1	2	05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		2 Orang	65,004,000	2 Orang	65,000,000
8	01	1	2	05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		6 Orang	74,997,000	6 Orang	75,000,000





8	01	02			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Masyarakat yang dibina di Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Selama 3 Tahun		0.31	1,249,771,674	0.50	1,300,000,000
8	01	02	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Masyarakat yang dibina di Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Selama 3 Tahun		0.31	1,249,771,674	0.50	1,300,000,000
8	01	02	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kabupaten/ Kota Prov. Kalteng Kab. Seruyan	120 Orang	180,205,500	140 Orang	150,000,000
8	01	02	2.01	08	Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	Kab. Seruyan	71 Orang	999,816,174	71 Orang	1,000,000,000
8	01	02	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kabupaten/ Kota Prov. Kalteng Kab. Seruyan	50 Orang	38,170,000	50 Orang	50,000,000
8	01	02	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab. Seruyan	3 Laporan	31,580,000	3 Laporan	100,000,000





8	01	03			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Masyarakat yang mendapatkan Pembinaan Politik Selama 3 Tahun		0.38	245,343,900	0.60	300,000,000
8	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase Masyarakat yang mendapatkan Pembinaan Politik Selama 3 Tahun		0.38	245,343,900	0.60	300,000,000
8	01	03	2.01	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	Kab. Seruyan	2 Dokumen	49,999,900	2 Dokumen	50,000,000
8	01	03	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab. Seruyan	130 Orang	75,013,000	150 Orang	100,000,000





8	01	03	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kabupaten/ Kota Prov. Kalteng Kab. Seruyan	80 Orang	84,583,000	80 Orang	75,000,000
8	01	03	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab. Seruyan	4 Laporan	35,748,000	4 Laporan	75,000,000
8	01	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Ormas dan LSM yang ber-SKT.		49.50	99,935,000	52.48	100,000,000
8	01	04	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Ormas dan LSM yang ber-SKT.		49.50	99,935,000	52.48	100,000,000
8	01	04	2.01	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	Kabupaten/ Kota Prov. Kalteng Kab. Seruyan	2 Dokumen	47,486,000	2 Dokumen	50,000,000
8	01	04	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kabupaten/ Kota Prov. Kalteng Kab. Seruyan	155 Orang	52,449,000	152 Orang	50,000,000





8	01	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Masyarakat yang mendapatkan pembinaan di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		0.34	175,070,000	0.53	200,000,000
8	01	05	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	Persentase Masyarakat yang mendapatkan pembinaan di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		0.34	175,070,000	0.53	200,000,000
8	01	05	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kabupaten/ Kota Prov. Kalteng Kab. Seruyan	185 Orang	55,975,000	190 Orang	75,000,000
8	01	05	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		80 Orang	58,060,000	90 Orang	50,000,000
8	01	05	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kabupaten/ Kota Prov. Kalteng Kab. Seruyan	4 Laporan	61,035,000	4 Laporan	75,000,000





8	01	06			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Konflik Sosial yang diselesaikan.		60%	224,971,000	70%	275,000,000
8	01	06	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase Konflik Sosial yang ditangani		60%	224,971,000	70%	275,000,000
8	01	06	2.01	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	Kabupaten/ Kota Prov. Kalteng Kab. Seruyan	2 Dokumen	18,632,000	2 Dokumen	50,000,000
8	01	06	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kabupaten/ Kota Prov. Kalteng Kab. Seruyan	11 Orang	74,751,000	11 Orang	75,000,000
8	01	06	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kabupaten/ Kota Prov. Kalteng Kab. Seruyan	70 Orang	76,258,000	80 Orang	50,000,000
8	01	06	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab. Seruyan	4 Laporan	55,330,000	4 Laporan	100,000,000
JUMLAH									7,066,144,000.00		7,390,565,000.00

RENJA
2025





BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja (RENJA) merupakan acuan setiap Perangkat Daerah (PD) dalam mengoperasionalkan program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi jangka menengah daerah. Dengan rencana kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan, maka menjadi satu instrumen dan indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah.

Penyusunan RENJA berpedoman pada RENSTRA Badan KESBANGPOL Kabupaten Seruyan dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Penyusunan RENJA bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD. RENJA yang disusun ini merupakan bagian yang utuh dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026 dan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan KESBANGPOL Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026. Keduanya merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Adapun rumusan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2025 pada RENJA ini dengan program, kegiatan dan sub kegiatan serta pagu indikatif mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026 dan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan KESBANGPOL Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026 sebagaimana disajikan dalam Tabel 4.1., Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Kab. Seruyan Tahun 2025 dan Tabel 4.2 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2026 Pada Aplikasi SIPD-RI berikut.





Tabel 4.1
Rencana Kerja Dan Pendanaan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Kabupaten Seruyan Tahun 2025

Kodefikasi					Rencana Tahun 2025	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Urusan	Bidang urusan	Program	Kegiatan	Sub kegiatan				
8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM			
8	01				BIDANG URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			7,066,144,000.00
8	01	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase unit kerja yang mendapatkan administrasi perkantoran	100%	5,071,052,426
8	01	1	2	01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dilaksanakan	100%	154,970,400
8	01	1	2	01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	109,990,000
8	01	1	2	01.06	Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	29,995,000
8	01	1	2	01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	14,985,400

RENJA
2025



8	01	1	2	02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	3,044,693,466.00
8	01	1	2	02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23 Orang	3,044,693,466
8	01	1	2	08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	807,786,970
8	01	1	2	08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	11,000,000
8	01	1	2	08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	76,201,690
8	01	1	2	08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	641,348,280.00
8	01	1	2	08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	79,237,000
8	01	1	2	06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	410,045,750
8	01	1	2	06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	15,200,000
8	01	1	2	06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	9,510,000
8	01	1	2	06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	16,150,000
8	01	1	2	06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	12,436,200
8	01	1	2	06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	8 Paket	13,300,000

RENJA
2025





8	01	1	2	06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	123,561,550
8	01	1	2	06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90 Laporan	219,888,000
8	01	1	2	07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	300,382,726
	01	1	2	07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	154,954,926
8	01	1	2	07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	145,427,800
8	01	1	2	09	Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan	100%	143,062,114
8	01	1	2	09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit	68,380,000
8	01	1	2	09.06	Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	55,102,500
	01	1	2	09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	19,579,614
8	01	1	2	05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang disediakan	100%	210,111,000
8	01	1	2	05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	57 Paket	70,110,000
8	01	1	2	05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	65,004,000
8	01	1	2	05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	6 Orang	74,997,000

RENJA
2025



8	01	1	2	06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	123,561,550
8	01	1	2	06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90 Laporan	219,888,000
8	01	1	2	07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	300,382,726
	01	1	2	07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	154,954,926
8	01	1	2	07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	145,427,800
8	01	1	2	09	Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan	100%	143,062,114
8	01	1	2	09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit	68,380,000
8	01	1	2	09.06	Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	55,102,500
	01	1	2	09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	19,579,614
8	01	1	2	05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang disediakan	100%	210,111,000
8	01	1	2	05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	57 Paket	70,110,000
8	01	1	2	05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	65,004,000
8	01	1	2	05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	6 Orang	74,997,000

RENJA
2025





8	01	02			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Masyarakat yang dibina di Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Selama 3 Tahun	0.31	1,249,771,674
8	01	02	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Masyarakat yang dibina di Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Selama 3 Tahun	0.31	1,249,771,674
8	01	02	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	120 Orang	180,205,500
8	01	02	2.01	08	Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	71 Orang	999,816,174
8	01	02	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	50 Orang	38,170,000
8	01	02	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	3 Laporan	31,580,000
8	01	03			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Masyarakat yang mendapatkan Pembinaan Politik Selama 3 Tahun	0.38	245,343,900
8	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase Masyarakat yang mendapatkan Pembinaan Politik Selama 3 Tahun	0.38	245,343,900

RENJA
2025



8	01	03	2.01	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	2 Dokumen	49,999,900
8	01	03	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	130 Orang	75,013,000
8	01	03	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	80 Orang	84,583,000
8	01	03	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	4 Laporan	35,748,000
8	01	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Ormas dan LSM yang ber-SKT.	49.50	99,935,000
8	01	04	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Ormas dan LSM yang ber-SKT.	49.50	99,935,000



8	01	04	2.01	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan hasil penyusunan bahan kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	2 Dokumen	47,486,000
8	01	04	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	155 Orang	52,449,000
8	01	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Masyarakat yang mendapatkan pembinaan di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Selama 3 Tahun	0.34	175,070,000
8	01	05	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	Persentase Masyarakat yang mendapatkan pembinaan di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Selama 3 Tahun	0.34	175,070,000
8	01	05	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	185 Orang	55,975,000
8	01	05	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	80 Orang	58,060,000
8	01	05	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	4 Laporan	61,035,000





8	01	06			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Konflik Sosial yang diselesaikan.	60%	224,971,000
8	01	06	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase Konflik Sosial yang ditangani	60%	224,971,000
8	01	06	2.01	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	2 Dokumen	18,632,000
8	01	06	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	11 Orang	74,751,000
8	01	06	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	70 Orang	76,258,000
8	01	06	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	4 Laporan	55,330,000
JUMLAH								7,066,144,000.00



Tabel 4.1
Rencana Kerja Dan Pendanaan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Kabupaten Seruyan Tahun 2025

Kodefikasi					Rencana Tahun 2025			
Urusan	Bidang urusan	Program	Kegiatan	Sub kegiatan				
8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM			
8	01				BIDANG URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			7,066,144,000.00
8	01	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase unit kerja yang mendapatkan administrasi perkantoran	100%	5,066,144,000.00
8	01	1	2	01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dilaksanakan	100%	155,000,000.00
8	01	1	2	01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	110,000,000.00
8	01	1	2	01.06	Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	30,000,000.00
8	01	1	2	01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	15,000,000.00
8	01	1	2	02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	3,000,000,000.00
8	01	1	2	02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23 Orang	3,000,000,000.00



8	01	1	2	08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	767,000,000
8	01	1	2	08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12,000,000
8	01	1	2	08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	75,000,000
8	01	1	2	08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	600,000,000.00
8	01	1	2	08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	80,000,000
8	01	1	2	06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	480,000,000
8	01	1	2	06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	20,000,000
8	01	1	2	06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	15,000,000
8	01	1	2	06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	25,000,000
8	01	1	2	06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	20,000,000
8	01	1	2	06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	8 Paket	20,000,000
8	01	1	2	06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	160,000,000
8	01	1	2	06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90 Laporan	220,000,000



8	01	1	2	07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	300,044,000
	01	1	2	07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	155,044,000
8	01	1	2	07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	145,000,000
8	01	1	2	09	Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan	100%	148,500,000
8	01	1	2	09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit	68,500,000
8	01	1	2	09.06	Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	60,000,000
	01	1	2	09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	20,000,000
8	01	1	2	05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang disediakan	100%	215,600,000
8	01	1	2	05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	57 Paket	75,600,000
8	01	1	2	05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	65,000,000
8	01	1	2	05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	6 Orang	75,000,000



8	01	02			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Masyarakat yang dibina di Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Selama 3 Tahun	0.31	1,250,000,000
8	01	02	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Masyarakat yang dibina di Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Selama 3 Tahun	0.31	1,250,000,000
8	01	02	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	120 Orang	125,000,000
8	01	02	2.01	08	Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	71 Orang	1,000,000,000
8	01	02	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	50 Orang	50,000,000
8	01	02	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	3 Laporan	75,000,000
8	01	03			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Masyarakat yang mendapatkan Pembinaan Politik Selama 3 Tahun	0.38	250,000,000
8	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase Masyarakat yang mendapatkan Pembinaan Politik Selama 3 Tahun	0.38	250,000,000



8	01	03	2.01	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	2 Dokumen	50,000,000
8	01	03	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	130 Orang	75,000,000
8	01	03	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	80 Orang	50,000,000
8	01	03	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	4 Laporan	75,000,000



8	01	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Ormas dan LSM yang ber-SKT.	49.50	100,000,000
8	01	04	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Ormas dan LSM yang ber-SKT.	49.50	100,000,000
8	01	04	2.01	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan hasil penyusunan bahan kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	2 Dokumen	50,000,000
8	01	04	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	155 Orang	50,000,000
8	01	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Masyarakat yang mendapatkan pembinaan di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Selama 3 Tahun	0.34	175,000,000
8	01	05	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	Persentase Masyarakat yang mendapatkan pembinaan di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Selama 3 Tahun	0.34	175,000,000
8	01	05	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	185 Orang	50,000,000
8	01	05	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	80 Orang	50,000,000



8	01	05	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	4 Laporan	75,000,000
8	01	06			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Konflik Sosial yang diselesaikan.	60%	225,000,000
8	01	06	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase Konflik Sosial yang ditangani	60%	225,000,000
8	01	06	2.01	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	2 Dokumen	50,000,000
8	01	06	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	11 Orang	50,000,000

RENJA
2025





Rencana Kerja (RENJA)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Seruyan Tahun 2025

8	01	06	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	70 Orang	50,000,000
8	01	06	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	4 Laporan	75,000,000
JUMLAH								7,066,144,000.00

RENJA

2025

8	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang		2 Orang				Kab. Sarayun, Semua Kecamatan, ALOKASI UMUM	DAKAS TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencapaian dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	06. Percepatan implementasi reformasi birokrasi di seluruh urusan pemerintahan	kebangpoi	2 Orang		65.000.000,00	BADAN KESETUJUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	6 Orang		6 Orang				Kab. Sarayun, Semua Kecamatan, ALOKASI UMUM	DAKAS TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencapaian dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	06. Percepatan implementasi reformasi birokrasi di seluruh urusan pemerintahan	kebangpoi	6 Orang		74.597.000,00	BADAN KESETUJUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%		100 %		410.045.750,00		Kab. Sarayun, Semua Kecamatan, ALOKASI UMUM	DAKAS TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencapaian dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	06. Percepatan implementasi reformasi birokrasi di seluruh urusan pemerintahan	kebangpoi	100%		410.045.750,00	BADAN KESETUJUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Dididatikan	Jumlah paket komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Dididatikan	1 Paket		1 Paket		9.510.000,00		Kab. Sarayun, Semua Kecamatan, ALOKASI UMUM	DAKAS TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencapaian dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	06. Percepatan implementasi reformasi birokrasi di seluruh urusan pemerintahan	kebangpoi	1 Paket		15.000.000,00	BADAN KESETUJUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.06	0002	Penyediaan Perabotan dan Perlengkapan Kantor yang Dididatikan	Jumlah Paket Perabotan dan Perlengkapan Kantor yang Dididatikan	1 Paket		1 Paket		16.150.000,00		Kab. Sarayun, Semua Kecamatan, ALOKASI UMUM	DAKAS TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencapaian dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	06. Percepatan implementasi reformasi birokrasi di seluruh urusan pemerintahan	kebangpoi	1 Paket		25.000.000,00	BADAN KESETUJUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.06	0003	Penyediaan Perabotan Rumah yang Dididatikan	Jumlah Paket Perabotan Rumah yang Dididatikan	1 Paket		1 Paket		12.436.200,00		Kab. Sarayun, Semua Kecamatan, ALOKASI UMUM	DAKAS TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencapaian dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	06. Percepatan implementasi reformasi birokrasi di seluruh urusan pemerintahan	kebangpoi	1 Paket		20.000.000,00	BADAN KESETUJUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang Dididatikan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Dididatikan	3 Paket		3 Paket		123.561.550,00		Kab. Sarayun, Semua Kecamatan, ALOKASI UMUM	DAKAS TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencapaian dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	06. Percepatan implementasi reformasi birokrasi di seluruh urusan pemerintahan	kebangpoi	3 Paket		160.000.000,00	BADAN KESETUJUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Pengemasan yang Dididatikan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengemasan yang Dididatikan	4 Paket		4 Paket		15.200.000,00		Kab. Sarayun, Semua Kecamatan, ALOKASI UMUM	DAKAS TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencapaian dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	06. Percepatan implementasi reformasi birokrasi di seluruh urusan pemerintahan	kebangpoi	4 Paket		20.000.000,00	BADAN KESETUJUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Besar dan Perlengkapan yang Dididatikan	Jumlah Dokumen Bahan Besar dan Perlengkapan yang Dididatikan	8 Dokumen		8 Dokumen		13.300.000,00		Kab. Sarayun, Semua Kecamatan, ALOKASI UMUM	DAKAS TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencapaian dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	06. Percepatan implementasi reformasi birokrasi di seluruh urusan pemerintahan	kebangpoi	8 Dokumen		20.000.000,00	BADAN KESETUJUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.06	0009	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90 Laporan		90 Laporan		219.888.000,00		Kab. Sarayun, Semua Kecamatan, ALOKASI UMUM	DAKAS TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencapaian dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	06. Percepatan implementasi reformasi birokrasi di seluruh urusan pemerintahan	kebangpoi	90 Laporan		220.000.000,00	BADAN KESETUJUAN BANGSA DAN POLITIK

8	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%			100 %	300.382.726,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	06. Percepatan implementasi reformasi birokrasi di seluruh urusan pemerintahan	Kesbangpol	100%		290.000.000,00	
8	01	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit			1 Unit	154.954.926,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	06. Percepatan implementasi reformasi birokrasi di seluruh urusan pemerintahan	Kesbangpol	1 Unit		145.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit			10 Unit	145.427.800,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	06. Percepatan implementasi reformasi birokrasi di seluruh urusan pemerintahan	Kesbangpol	10 Unit		145.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%			100 %	807.786.970,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	06. Percepatan implementasi reformasi birokrasi di seluruh urusan pemerintahan	-	100%		767.000.000,00	
8	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan			12 Laporan	11.000.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	06. Percepatan implementasi reformasi birokrasi di seluruh urusan pemerintahan	-	12 Laporan		12.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan			12 Laporan	76.201.690,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	06. Percepatan implementasi reformasi birokrasi di seluruh urusan pemerintahan	-	12 Laporan		75.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan			4 Laporan	79.237.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	06. Percepatan implementasi reformasi birokrasi di seluruh urusan pemerintahan	-	4 Laporan		80.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan			12 Laporan	641.348.280,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	06. Percepatan implementasi reformasi birokrasi di seluruh urusan pemerintahan	-	12 Laporan		600.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan	100%			100 %	143.062.114,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	06. Percepatan implementasi reformasi birokrasi di seluruh urusan pemerintahan	Kesbangpol	100%		153.500.000,00	
8	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit			10 Unit	68.380.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	06. Percepatan implementasi reformasi birokrasi di seluruh urusan pemerintahan	Kesbangpol	10 Unit		68.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

8	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit			50 Unit	55.102.500,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	06. Percepatan implementasi reformasi birokrasi di seluruh urusan pemerintahan	Kesbangpol	50 Unit	60.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit			1 Unit	19.579.614,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	06. Percepatan implementasi reformasi birokrasi di seluruh urusan pemerintahan	Kesbangpol		25.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
2	8	01	02		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Masyarakat yang dibina di Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Selama 3 Tahun	0.31 %			0.31 %	1.249.771.674,00						0.31 %	1.300.000.000,00	
8	01	02	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Masyarakat yang dibina di Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Selama 3 Tahun	0.50%			0.31 %	1.249.771.674,00			Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia	Anak Usia Sekolah, Ormas-LSM, Partai Politik, Lembaga dan Masyarakat	0.50%	1.300.000.000,00	
8	01	02	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	71 Orang			120 Orang	180.205.500,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia	Anak Usia Sekolah, Ormas-LSM, Partai Politik, Lembaga dan Masyarakat	71 Orang	150.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	02	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	50 Orang			50 Orang	38.170.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia	Anak Usia Sekolah, Ormas-LSM, Partai Politik, Lembaga dan Masyarakat	50 Orang	50.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	02	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	3 Laporan			3 Laporan	31.580.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia	Anak Usia Sekolah, Ormas-LSM, Partai Politik, Lembaga dan Masyarakat	3 Laporan	100.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

[illegible]

8	01	05	2.01	0003	Penyusunan Kebijakan di Bidang Kesehatan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Penanganan Penyelenggaraan Narkotika, Fasilitas Kesehatan Umat Beragama dan Penyelenggaraan Keperawatan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kesehatan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Penanganan Penyelenggaraan Narkotika, Fasilitas Kesehatan Umat Beragama dan Penyelenggaraan Keperawatan di Daerah	190 Orang	180 Orang	55.973.000,00	Kab. Sragen, Kecamatan, AlOKAS UNUM Kel/Desa	Memperkuat Penyebaran kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan Tolak-tolak Anarkisme Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Mewujudkan kerentanan dan ketertarikan umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya diri harmonisasi pada kelompok masyarakat dari kalangan Negara Kesatuan Republik Indonesia	190 Orang	73.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	05	2.01	0004	Penyusunan Kebijakan di Bidang Kesehatan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Penanganan Penyelenggaraan Narkotika, Fasilitas Kesehatan Umat Beragama dan Penyelenggaraan Keperawatan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kesehatan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Penanganan Penyelenggaraan Narkotika, Fasilitas Kesehatan Umat Beragama dan Penyelenggaraan Keperawatan di Daerah	90 Orang	80 Orang	58.060.000,00	Kab. Sragen, Kecamatan, AlOKAS UNUM Kel/Desa	Memperkuat Penyebaran kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan Tolak-tolak Anarkisme Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Mewujudkan kerentanan dan ketertarikan umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya diri harmonisasi pada kelompok masyarakat dari kalangan Negara Kesatuan Republik Indonesia	90 Orang	50.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	05	2.01	0005	Penyusunan Kebijakan di Bidang Kesehatan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Penanganan Penyelenggaraan Narkotika, Fasilitas Kesehatan Umat Beragama dan Penyelenggaraan Keperawatan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kesehatan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Penanganan Penyelenggaraan Narkotika, Fasilitas Kesehatan Umat Beragama dan Penyelenggaraan Keperawatan di Daerah	4 Laporan	4 Laporan	61.035.000,00	Kab. Sragen, Kecamatan, AlOKAS UNUM Kel/Desa	Memperkuat Penyebaran kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan Tolak-tolak Anarkisme Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Mewujudkan kerentanan dan ketertarikan umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya diri harmonisasi pada kelompok masyarakat dari kalangan Negara Kesatuan Republik Indonesia	4 Laporan	73.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
6	8	01	06		PROGRAM PENINGKATAN KEMASYARAKATAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITAS PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Konflik Sosial yang diselesaikan	60 %	60 %	224.971.000,00			Mewujudkan kerentanan dan ketertarikan umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya diri harmonisasi pada kelompok masyarakat dari kalangan Negara Kesatuan Republik Indonesia	60 %	275.000.000,00	
8	01	06	2.01		Penyusunan kebijakan Teknis dan pelaksanaan Pemertanahan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase Konflik Sosial yang diselesaikan	70%	60 %	224.971.000,00		Memperkuat Reformasi Politik, hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pengawasan dan Pemberantasan Korupsi, Narkotika, Judi dan Penyelundupan	Mewujudkan kerentanan dan ketertarikan umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya diri harmonisasi pada kelompok masyarakat dari kalangan Negara Kesatuan Republik Indonesia	70%	275.000.000,00	
8	01	06	2.01	0002	Penyusunan Bahan Penyusunan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemertanahan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembara Kerja, Penanganan Bidang Pertahanan nira Negara, Kewaspadaan dan Kewaspadaan Pertahanan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemertanahan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembara Kerja, Kewaspadaan dan Kewaspadaan Pertahanan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	18.632.000,00	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, AlOKAS UNUM Kel/Desa	Memperkuat Reformasi Politik, hukum dan Birokrasi, serta Memperkuat Pengawasan dan Pemberantasan Korupsi, Narkotika, Judi dan Penyelundupan	Mewujudkan kerentanan dan ketertarikan umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya diri harmonisasi pada kelompok masyarakat dari kalangan Negara Kesatuan Republik Indonesia	2 Dokumen	50.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

[illegible]



BAB V PENUTUP

Pada prinsipnya bahwa Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dirumuskan secara transparan, responsive, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Penyusunan RENJA Tahun 2025 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik juga berorientasi pada proses dengan menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis dan atas-bawah dan bawah-atas, sedangkan yang berorientasi pada substansi, menggunakan pendekatan holistik-tematik, integratif dan spasial. Penyusunan RENJA Tahun 2025 juga dilakukan dengan tahapan dari persiapan penyusunan, penyusunan rancangan akhir, penyusunan rancangan, pelaksanaan Musrenbang, perumusan rancangan akhir dan penetapan.

Perumusan Rencana Kerja Perangkat Daerah RENJA Tahun 2025 ini disusun dengan berpedoman pada kaidah-kaidah pelaksanaan yang berlaku yaitu RPJP dan RPJM Nasional serta RPJP dan RPJM Provinsi, Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Seruyan, RPJPD, RPD, RKPD, Renstra-PD, KUA-PPAS, Renja-PD, DPA SOPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan.

Rencana tindaklanjut dari rumusan Rencana Kerja Perangkat Daerah RENJA Tahun 2025 ini juga adalah sebagai bahan penyusunan dan penetapan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Seruyan, Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah dan Rencana Operasional pada rencana Tahun Anggaran 2024.

Demikian Rencana Kerja Perangkat Daerah RENJA Tahun 2025 ini dibuat dan diharapkan akan menjadi pedoman semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan, sehingga seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan akan dapat dicapai secara terukur, terarah, efektif dan efisien.

Kuala Pembuang, Agustus 2024

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Seruyan,

HARTA SIMA, M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 19650228 198812 1 001

